



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RANWAL RENJA) TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
JL. RA BASUNI NO 4 MOJOKERTO

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	43
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	70
2.4. Review Terhadap RKPD	71
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	86
Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	87
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	87
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	87
3.3. Program dan Kegiatan.....	90
Bab IV. Rencanan Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	110
Bab V. Penutup	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 berfokus pada Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, sebagaimana sesuai dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah *Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dan memperhatikan Tahapan dan Skala Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-4 (2021-2025)* pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 yaitu : *Mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur, tentram, dan beradab melalui percepatan, pemerataan pembangunan di segala bidang, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan terkendali, serta memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia.* Maka, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan Rancangan Tema pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah: *“Mempercepat Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM”*.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pe

ngendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi Persiapan penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Awal Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dari mengacu pada dokumen perencanaan lainnya yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, rancangan awal RKPD, dan evaluasi Renja Tahun yang lalu. Hal bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

1.2. Landasan Hukum

Sedangkan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto

Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6)

14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto;
20. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dari Dinas Kesehatan dalam pembangunan daerah

1.3.2 Tujuan

1. Untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen

RKPD dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

2. Untuk pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ini sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.5. Latar belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.6. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
- 2.7. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.8. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.10. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.4. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.5. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan
- 3.6. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Bab V. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Evaluasi Rencana Kerja adalah bagian dari proses pengukuran keberhasilan dari suatu perangkat daerah. Pada tahap ini beberapa kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang tidak tercapai dapat dievaluasi sehingga perangkat daerah dapat menentukan kebijakan baru dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pada tahun 2023, alokasi anggaran yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto adalah Rp. 250.634.361.490 dan realisasinya adalah Rp. 222.914.199.552 atau sekitar 88,94%. Realisasi lebih rendah dari tahun 2022. Ada beberapa kegiatan yang mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya sehingga realisasi keuangan belum bisa maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Dari realisasi anggaran tahun 2023, di penganggaran Dinas Kesehatan terdapat 75 sub kegiatan sedangkan puskesmas terdapat 3 kelompok penganggaran yaitu BOP Puskesmas, BLUD dan BOK Puskesmas. Dari 75 sub kegiatan di Dinas Kesehatan, yang realisasinya 100% ada 3 sub kegiatan, ada 42 Sub Kegiatan yang realisasinya diatas 90%, 13 sub kegiatan realisasi antara 80%-90% dan dibawah 80% ada 17 sub kegiatan. Sub Kegiatan yang realisasinya bisa mencapai 100% antara lain sub kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat.

Sub kegiatan yang realisasi diatas 90% antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 99,05%
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 93,09%
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99,94%
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 98,36%
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 96,94%
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 92,67%

7. Penyediaan Bahan/Material 96,02%
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96,06%
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 99,79%
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96,38%
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 99,11%
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97,78%
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 95,52%
14. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 93,67%
15. Pengadaan Bahan Habis Pakai 91,39%
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 93%
17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 91,39%
18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 99,13%
19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 98,14%
20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 90,47%
21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 99,11%
22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 94,18%
23. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 90,66%
24. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 92,35%
25. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 92,35%
26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 91,80%
27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 96,51%
28. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 95,76%
29. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 99,97%
30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 98,97%
31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 98,55%

32. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 99,83%
33. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 99,98%
34. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 96,6%
35. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 98,78%
36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria 99,84%
37. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 99,53%
38. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 99,34%
39. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 96,25%
40. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 90,43%
41. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 97,19%
42. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 99,97%

Sub kegiatan yang realisasi antara 80%-90% antara lain :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 83,43%
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 87,52%
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu 81,93%
4. Pengadaan Obat, Vaksin 85,43%
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 83,12%
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 81,64%
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 88,41%
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 87,01%
9. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 88,75%
10. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 84,19%
11. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 88,33%

12. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 84,18%
13. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 89,78%

Realisasi kegiatan dibawah 80% antara lain :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 75,10%
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 76,07%
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 78,68%
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 32,87%
5. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13,48%
6. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 44,79%
7. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 64,71%
8. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 75,61%
9. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 72,77%
10. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 70,09%
11. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 68,05%
12. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67,14%
13. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 55,14%
14. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 79,34%
15. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 68,94%

16. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0%
17. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga 76,53%

Anggaran yang dikelola Puskesmas yaitu anggaran BLUD, BOK Puskesmas dan BOP Puskesmas realisasi diatas 88,93% dengan rincian BLUD Rp. 56.513.611.440 realisasi Rp. 50.636.510.375 (89,60%), BOK Puskesmas Rp. 17.867.433.000 realisasi Rp. 14.793.724.913 (82,90%), BOP Puskesmas Rp. 8.813.161.440 realisasi Rp. 8.559.267.916 (97,12%).

Jika dilihat dari realisasi anggaran keseluruhan, capaian realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mencapai 88,94% yang menurun dari tahun 2022 dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan, ada beberapa kendala yang dihadapi walaupun bisa diatasi oleh Dinas Kesehatan. Kendala tersebut antara lain :

1. Dana APBD : ada beberapa sub kegiatan yang penyusunan DPAnya masih ada komponen belanja yang tidak sesuai, sehingga harus dilakukan pergeseran maupun penyesuaian di PAPBD.
2. Dana APBN DAK Non Fisik BOK Puskesmas : adanya kendala pada sistem penatausahaan keuangan dan pelaporan yaitu pelimpahan dari PA ke KPA, perubahan juknis alokasi untuk Catridge TCM di realokasikan ke menu PMT Lokal, perubahan juknis aturan pelaksanaan perjalanan dinas. Sehingga ada hambatan puskesmas dalam proses realisasi anggaran.
3. Adanya SiLPA di beberapa sub kegiatan, dikarenakan juknis penyerapan diperuntukan untuk perjalanan dinas pelacakan kasus Covid 19.

Dan berikut gambaran Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan (Terlampir)

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 KAB. MOJOKERTO (TC 29)

DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
	Nilai RB									
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,085 (A)	87,18	87.50 (A);	87.30 (A)	100%	87,5	87,33	103,86
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik	88%	88%	82%	82%	100%	84%	85%	96%

	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah dok yang disusun	7 dok	2 dok	2 dok	2 dokumen (renja dan p-renja)	100%	3 dok (Renja, Renstra, perubahan renstra)	7 dok	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Jumlah dok laporan kinerja dinas kesehatan	35 dok	9 dokumen (Renja, Renja Perubahan, LPPD, LKPJ, LKJIP, SAKIP, PMPRB, Lap Renja 3 triwulan)	9 dokumen	8 laporan (evaluasi renja triwulan, LKJIP, SAKIP, LPPD, LKPJ)	100%	7 dokumen	34	97,14
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9 dokumen	8 dok	88,89	7 dokumen	15 dokumen	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.1 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah	92	90,4	90,4	88,94%	98,38%	90%	89,78	98%

	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.1 Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	70 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	42 bulan	60
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			775 orang	775 Orang/bulan	100%	775 orang	775 orang	100%
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Puskesmas)	2.2 Ketersediaan jasa pelayanan sarana	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dok	
	3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(dinkes)	2.1 Jumlah penyediaan Gaji tenaga K2	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60

		2.2 Ketersediaan biaya operasional dinas kesehatan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	36 bulan	60%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	
	3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.1Persentase penyediaan sarana dan parasarana administrasi kepegawaian		88,89%	72%			72%		
	1.Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Kelengkapannya	0	2364	0	0	0,00%	0	0	0

	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.1 Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92	86,08	89%	89%	100,00%	90%	83,36%	91%
	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.1 Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	5 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	100%	1 paket	3 paket	300
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.1 jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	5 paket	1 Paket	1 Paket	3 paket	300%	1 Paket	5 Paket	100%

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 paket	300%	1 Paket	5 Paket	500
	3. Penyediaan bahan logistik kantor	4.1 Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	5 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%
	4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.1 Jumlah buku perundang undangan yang diadakan	5 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	
	5. Peyediaan bahan/material	4.1 Jumlah ATK yang diadakan	5 paket	1 Paket	1 Paket	4 paket	400%	1 Paket	3 Paket	60
		Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan			1 Paket	4 paket	400%	1 Paket	5 Paket	
	6. Fasilitas kunjungan tamu	4.1 jumlah makan dan minum tamu yang disediakan	5 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 paket	

	7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4.1 Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	5 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	
	8. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4.1 Jumlah penata usahaan arsip	5 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	
	5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	5.1 Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	92%	73,91%	89%	89,00%	100%	90%	84%	92%

	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1 Ketersediaan pembiayaan komunikasi,SDA, listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	
	6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	6.1 persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	92%	92%	89%	89%	100%	90%	90%	98%

	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.1 Jumlah kendaraan yang dipelihara	75 unit	10 kendaraan	15 unit	35 unit	233,00%	15 unit	60 unit	80
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			15 unit	35 unit	233,00%	15 unit	50 unit	
	7. Peningkatan Pelayanan BLUD	7.1 Persentase puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terserap	95%	95%	95%		100%	92%	95%	98%

	1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.1 Ketersediaan jasa pelayanan, sarana prasarana dan operasional	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60
	IKM Bidang Kesehatan		83,46	84,49	85,49	86,02	100%	86,28%	85,6	102,00%
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.1 AKI	110/100.000 KH	49,94/100.000 KH (8/16019*100000)	48,94/100.000 KH	65/100,000 KH; (11 ibu/16,906)	65/100,000 KH; (11 ibu/16,906)	65/100.000 KH	65/100,000 KH; (11 ibu/16,906)	
		1.2AKB	4,1/1.000 KH	4,43/1000 KH (71/16.019*1000)	4.4/100,000 KH	4/1,000 KH; (70 bayi/16,906)	100%	4.1/100,000 KH	4/1,000 KH; (70 bayi/16,906)	
		1.3 Persentase Stunting	15%	3,80%	2,00%	1,39%	70%	5,00%	1,39%	
		1.4 Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	100%(27 Pusk, 2 RS)	5,08% (1 puskesmas Watukenongo.2 RS)	34.00% (10 puskesmas)	100% (27 puskesmas, 38 klinik, 1 labkesda);	100%	100% (20 Klinik)	100% (27 puskesmas, 38 klinik, 1 labkesda);	100% (27 puskesmas, 38 klinik, 1 labkesda);

		Paripurna								
		1.5 Persentase KLB yang ditangani	31 %(94 desa)	98,36 % (299 desa)	56.00% (169 desa)	0.00%;	100%	47% (144 desa)	48,45	
		1.6 Persentase ODF	100%	304 desa odf (100%)	100%	100%;	100%	100%	100%	100%
		1.7 penghargaan swastisaba(kabupaten sehat)	swastisaba wistara	tidak mengajukan tahun ini nanti tahun depan 2023	swastisaba padapa	Swastisaba Padapa;	0%	swastisaba wiwerda	swastisaba padapa	
		1.8 Persentase kunjungan masyarakat kefasilitas kesehatan : rawat jalan dan rawat inap	66,5% dan 6,7 %	1.461.758 RJ (99,65) 5073 RI (0,35%)	99,65% dan 6,40%	128% & 0.4%;	100%	63,5% dan 6,4%	97,05% dan 2,38%	
		1.9 Persentase indikator SPM yang mencapai target	100% (12 indikator)	89,22 %(10 Indikator)	83,3%(10 indikator)	83.30% (10 indikator);	100%	84%(10 indikator)	83,3%(10 indikator)	83

		1.10 Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	93%	99% (1072/1080*100)	99,20%	100.00%;	100%	91,00%	96,60%	103,87%
		1.11 persentase ketersediaan alkes sesuai standar	93%	90%	90%	99,70%	100%	91,00%	96.5%	103,8
	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.1 Jumlah gedung yang direhab	27	5 puskesmas (Ngoro, Dawar, Bangsal, Trawas, Trowulan)	5 puskesmas	2 puskesmas;	40%	5 puskesmas	12 puskesmas	44,44
		1.2 Jumlah gedung pustu yang terpelihara dengan baik	55 pustu	33 pustu	2 gedung pustu	2 pustu	100%	10 gedung pustu	45 gedung pustu	81,8182

		1.3 Jumlah sarana prasarana fasilitas kesehatan yang terpelihara dengan baik	27 sarana	329 kit antropometri, 5 ambulans	26 sarana	2 pustu, 11 paket, 5 paket, 1 paket, 27 unit	100%	26 sarana	27 sarana	100%
		1.4 jumlah pengadaan alkes/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	46 paket	Posbindu KIT 77 paket, USG 2 D 2 unit, Alkes Pustu 20 Paket, Alkes pendukung UKS 615 paket	4 paket	11 paket	275%	8 paket	38 paket	82,6
		1.5 jumlah pengadaan obat ,vaksin	45paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	11 paket	13 paket	28,9
		1.6 jumlah pengadaan bahan habis pakai	30 paket	2 paket	5 paket	27 unit	100%	7 paket	36 paket	120

		1.7 jumlah pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	35 paket	1 paket	7 paket	5 paket	71%	7 paket	13 paket	28,9
	1. Pembangunan puskesmas	1.1 Jumlah puskesmas yang di bangun	5	1 Pusk(pusk Bangsal)	1 pusk	0	0,00%	1 pusk	2 pusk	40
	2.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.1 Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	55 pustu	4 pusk 33 pustu	2 puskesmas, 2	2 puskesmas (puskesmas kemlagi, puskesmas tawangsari)	100%	10 pustu	6 puskesmas, 43 pustu	78,18
	3. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.1 Jumlah antropometri kit yang diadakan	2009	329 kit	958 unit antropometri		100%			
		1.2 Jumlah ambulance diadakan		5 ambulance	0			0	0	0

		1.1 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan(DID)	5 paket	1 paket(pospindu kit 77 paket)					
	4.Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.2 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan(P APBD)		20 pustu/paket	1 paket (iva kit, vaccin refrigerator, sanitarian kit, hematology analizer)	11 paket	100%	1 paket (iva kit, vaccin refrigerator, sanitarian kit, hematology analizer)	32 paket
		1.3 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan(DAK)		1 paket(usg 2 unit)					

	5. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1.1 Jumlah alat yang dikalibrasi	5 paket	1 paket	1 paket			1 paket		
	6. Pengadaan obat,vaksin	1.1 Jumlah ketersediaan penunjang DAK	60 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	36 bulan	60
		1.2 Jumlah obat yang diadakan	5 paket	1 paket	1 paket			1 paket	3 paket	60
	7. Pengadaan bahan habis pakai	1.1 Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	5 paket	1 paket	1 paket			1 paket	3 paket	60
	8. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.1 Jumlah kegiatan distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	60 bulan	120 kali/12 bulan	12 kali			12 kali	36 bulan	60

	2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.1 Jumlah layanan kesehatan yang mencapai target	150	32 layanan	30 layanan	30 layanan	100%	30 layanan	92 layanan	61,3
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.1 Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	89.665 bumil	15.284	18,450 ibu hamil	16,090 Orang	87,21%	18,550 ibu hamil	52924 ibu hamil	59,02
		2.2 jumlah giat audit perinatal	20 kali	0			-			
		2.3 jumlah kegiatan monev	25 kali	6 kali						
		jumlah kegiatan pelacakan kasus	40 kali	25 kali						
		jumlah supervisi fasilitatif	120 kali	14 kali						

	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.1 Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan	85.660 bulin	14663 bulin	17.558 bulin	14,770 bumil	84,12%	17.658 bulin	49.053	57,3
	3. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2.1 Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan	81.650 bayi	14896 bayi	16.902 bayi	14,829 bayi	92,98%	17002 bayi	46.727	57,23
		Jumlah kegiatan monev	25 kali	6 kali						
		jumlah kegiatan pelacakan	100 kali	25 kali						
		Jumlah kegiatan supervisi	150 kali	40 kali						
		Jumlah sosialisasi	15 kali	3 kali						
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.1 Jumlah balita yang mendapat pelayanan	329.910 balita	58834 balita	66752 balita	74,793 balita	112,05%	66852 balita	197.478	59,9

		Jumlah kegiatan monev	125 kali	30 kali						
		Jumlah kegiatan sosialisasi ke nakes	15 kali	3 kali						
		jumlah sosialisasi peningkatan kapasitas bidan	15 kali	3 kali						
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.1 Jumlah siswa kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat layanan kesehatan	141904	31372 orang	39.400 orang	33,807 orang	86%	40400 orang	105.579	74,4
		2.2 Jumlah Siswa yang Mengikuti Workshop	540 siswa	108 siswa						
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.1 Jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan	3751020	716625 orang	106.000 orang	759,379 orang	716,40%	107.100 orang	1.583.104	42,20

	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.1 Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan	656280	153276 orang	152.500 orang	159,521orang	105%	15300 orang	328.097	49,99
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.1 Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan	1745475	201294	79.776 orang	340,171 orang	426,41%	81.776 orang	623.241	35,71
		2.2 Jumlah posbindu yang terbentuk	1480	304 posbindu	304 posbindu			304 posbindu	304	304 posbindu
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.1 Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan	113045	18609 orang	46.700 orang	27,545 orang	59%	48.700 orang	94.854	83,91

	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.1 Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan	8685	1408	2.311 orang	2,204 orang	95,37%	2.511 orang	6.123	70,50
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.1 Jumlah Penderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan	60000	11600	2.713 orang	14,746 orang	544%	2.913 orang	29.259	48,77
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.1 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan	175.820 orang	14419	12.502 orang	21,447 orang	171,55%	13002 orang	48.868	27,79

		2.2 Jumlah penyediaan biaya penunjang utk operasional KPA	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah pembiayaan tracer	1.520 desa	304 desa	0	0	100%	0	0	0
		Jumlah Petugas Surveilens		27 puskesmas	0	0	100%	0	0	0
		Jumlah pemantauan isolasi			0	0		0	0	0
		Jumlah Pelacakan dan Pemantauan		625 bok	0	0	100%	0	0	0
		Jumlah pengiriman spesimen			0	0		0	0	0

		Jumlah pembelian APD			0	0		0	0	0
		Jumlah transport petugas tracing dinas			0	0		0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			1 dokumen lap	1 dokumen lap	100%	1 dokumen lap	1 dokumen lap	100%

	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		1 dok						
	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.1 Jumlah balita gizi buruk yang ditangani	450	66 balita	90 balita			90 balita		
		2.2 Jumlah Kegiatan Evaluasi Perencanaan Gizi	30 kali	6 kali	6 kali			6 kali		

		2.3 Jumlah Kader yang Mengikuti Pelatihan Emodemo dan PMBA	1520 kader	135 kader	135 kader			135 kader		
		2.4 Pengadaan Susu Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil	5 paket	2 paket(susu balita ,susu bumil)	2 paket(susu balita ,susu bumil)			2 paket(susu balita ,susu bumil)		
		2.5 Pelatihan Pojok Gizi	55 Pustu	55 Pustu	0			0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	

	16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.1 Jumlah guru OR dan UKS yang dibina	150 guru	54 guru			30		
		2.2 Jumlah Pos UKK yang dibina	115 pos	23 pos	27 pos		25 pos		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	
	17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.1 Jumlah depot air minum yang diperiksa	450 depot	93 depot	90 depot		90 depot	273	
		2.2 Jumlah sampel air minum yang diperiksa	350 sampel	73 sampel	70 sampel		70 sampel	213	
		2.3 Jumlah Kegiatan Studi Ehra	5 keg	1 keg	1 keg		1 keg	3 keg	

		2.4 Jumlah Pembentukan Pos UKK	5 pos	2 pos	1 pos			1 pos	4 pos	
		2.5 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak		360.624 KK	342.148 KK					
		2.6 Jumlah Jamban yang dibangun	150 unit	165 unit (DID)+16 unit TMMD	16 unit(TMMD)					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
	18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.1 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	280 kelompok	54 kelompok	0			0	110	0

		2.2 jumlah cetak banner	8.960 m2	329 m2	0			0	2120	0
		2.3 jumlah leaflet yang diadakan	15.500 lembar	27.000 lembar	0			0	30100	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan			1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
		Promosi Kesehatan								
	19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2.1 Jumlah layanan tradisional yang dibina	135 puskesmas	27 puskesmas	27 puskesmas			27 puskesmas	81	
		2.2 Jumlah Hatra (penyehat tradisional) pemegang STPT	60 kali	16 hatra	27 Puskesmas		100%	27 Puskesmas		
		2.3 Pembinaan Kader Asman Toga	135 puskesmas	27 puskesmas	27 puskesmas			27 puskesmas		
		2.4 jumlah Kader Asman Toga		27 Asman	27 Asman			27 Asman		

		2.5 Pengadaan Pohon Batra	135 Paket	27 Paket	27 Paket			27 Paket		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			1 dokumen			1 dokumen		
	20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.1 Jumlah kegiatan surveilans covid	1200	299 kali				240 kali		
		2.2 Jumlah kegiatan surveilans PD3I(Suspek Defteri)		7 kasus						

		2.3 Jumlah kehiatan pemeriksaan haji Jumlah kegiatan surveilens		1 kali						
		2.4 jumlah surveillance kepulauan haji jumlah kegiatan pemeriksaan haji	5 kali	1 kali				1 kali		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
	21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.1 Jumlah sosialisasi Napza disekolah	270 sekolah	74 sekolah		199 sekolah	137%	54 sekolah	327 sekolah	121
		2.2 jumlah pondok yang mendapatkan sosialisasi NAPZA	50 pondok	18 pondok		17 ponpes	180%	10 ponpes	45	90

		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			500 orang			500 orang	
	22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.1 Jumlah fogging fokus DBD	1250	275 foukus	260 fokus			250 fokus	
		2.2 jumlah nakes (pengelola program)yang ditingkatkan kemampuannya(d alam hal penanganan)		135 nakes					
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen

	23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.1 Jumlah PBID	482.690 orang	141.977 orang	141.977			43.143	380492	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
	24. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.1 Jumlah kegiatan pengiriman spesimen	1200	80 kali	80 kali	14 spesimen (11 kasus Difteri, 1 kasus AFP, 1 kasus campak, 1 kasus pertusis)	17,50%	240 kali	334 kali	27,83

		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan / Nasional yang Didistribusikan			1 dokumen			1 dokumen		
	25. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2.1 Jumlah tatanan yang harus diikuti	25	5 tatanan			100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	
	26. Operasional Pelayanan Puskesmas	2.1 Jumlah ketersediaan anggaran penduduk program di puskesmas	60 bulan	12 bulan	12 bulan		100%	12 bulan		

		2.2 Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan makan minum pasien	280.000 pasien	5073 pasien	0		9%	0	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen			1 dokumen	
	27. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.1 jumlah ketersediaan anggaran untuk operasional labkesda	60 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 dokumen			1 dokumen	
	28. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	2.1 Jumlah visitasi klinik	50	15 klinik,0 lab	10 klinik			10 klinik	

		2.2jumlah kegiatan PAM lebaran, Natal dan Tahun Baru	10	2 keg	2 keg			2 keg		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			27 puskesmas	21 puskesmas, 26 klinik, 1 labkesda	100%	27 puskesmas		27 puskesmas
	29. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.1 Jumlah bayi yang mendapat IDL	82330	17 004 bayi	17.757			17.957		

		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	
	30. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2.1 Jumlah kewaspadaan dini dan respon wabah	60 kali	12 kali	12 kali		100%	12 kali	36 kali	
		2.jumlah peningkatan kapasitas		4 kali						
		2.2Casefinding kasus penyakit disekitar lokasi wabah	500 kali	0						
		2.3surveillance terpadu	120 kali	0						
		2.4 kegiatan pelacakan kasus	1250 kali	0						

		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	
	31. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2.1 Jumlah sarana SPGDT yang diadakan	5 paket	1 paket	1 paket			1 paket	3 paket	

		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 PSC	28 unit, 11 unit RS	2800%	1 PSC	1 PSC	
	3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	3.1 Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik	41	35							
	1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3.1 jumlah data dan informasi yang dikelola	25	5 data	5 data	4 data	100%	5 data	15 data	60	

		Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola			5 data	4 data	100%	5 data	5 data	
	2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3.1 Jumlah portal sistem informasi yang harus dikelola	16	4 portal	4 portal	4 portal	100%	4 portal	12 portal	75
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
	3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	3.1 Jumlah peralatan telemedicina yang diadakan	0	26 paket	0			0	0	0

	4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.1Jumlah rumah sakit yang difasilitasi perijinannya	55 RS	11 RS	11 RS	11 RS	100%	2 RS	33 RS	60
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	4.1 jumlah pengendalian dan pengawasan izin operasional 11 RS	55 RS	11 RS	11 RS	11 RS	100%	2 RS	33 RS	60

		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			11 RS	11 RS	100%	11 RS	11 RS	
	2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.1 Jumlah tata Kelola pelayanan 11 rumah sakit sesuai standar kemenkes	55 RS	11 RS	11 RS	11 RS	100%	11 RS	33 RS	60

		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar			11 RS	11 RS	100%	11 RS	11 RS	
	3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4.1 Jumlah Mutu Pelayanan 11 rumah sakit sesuai standar kemenkes	55 RS	11 RS	11 RS	11 RS	100%	11 RS	33 RS	60

		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			27 puskesmas	27 puskesmas	100%	27 puskesmas	27 puskesmas	
	4. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.1 jumlah dokumen Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	10 kebijakan	2 Kebijakan			100%	2 dok		
	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.2 persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	90%	55%	75%	95%	95%	85%	55%	61%

	1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.1Jumlah pemberian izin praktek tenaga kesehatan diwilayah(medis dan paramedis)	6125	2048	1175	1175	100,00%	1225	4448	72,62
	1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.1 jumlah tenaga kesehatan yang diberikan izin	6125	2048 SIP	1.175 ijin	1.175 ijin	100,00%	1225	4448	72,62
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	

		Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
	2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.1 Jumlah pengadaan tenaga kesehatan sesuai standar yang ada	1220	254						
	1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.1 jumlah nakes yang direkrut	210 nakes	52 nakes	66 nakes			33 nakes	160	
		2.2 jumlah perawat ponkesdes yang dibiayai	1.055 orang	202 orng	211			211	624	

		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			211 perawat, 2 dokter, 33 nakes (dokter umum 7, dokter gigi 4, gizi 8, analis 1, D3 farmasi 13)	202 perawat, 8 dokter, 16 nakes (dokter umum 6, dokter gigi 2, gizi 5, analis 1, D3 farmasi 10)		211 perawat, 2 dokter, 33 nakes (dokter umum 7, dokter gigi 4, gizi 8, analis 1, D3 farmasi 13)	211 perawat, 2 dokter, 33 nakes (dokter umum 7, dokter gigi 4, gizi 8, analis 1, D3 farmasi 13)	
	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.3 Persentase apotik yang memenuhi standar kesehatan	100							
		apotik (96 apotik)	100%	57% (55 apotek)	57% (55 apotek)	57% (55 apotek)	100%	95%	57%	57%
		toko obat (2 toko obat)	100%	100	100%	100.00%;	100%	100%	100%	100%
		umot (1 umot)	100%	100	100%	100.00%;	100%	100%	100%	100%
		PIRT (120 PIRT) 74 % dari 1900 PIRT	100%	112 sertifikat	1540 (81%)/120 sertifikat	115 sertifikat (87.00%);	96%	1660(87%)	1888	99,4

		persentase sarana toko alkes dan perusahaan rumah tangga,perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan	100%	26% (4 PRT-PKRT)	20% (3 PRT-PKRT)	26%(4 PRT-PKRT)	26%(4 PRT-PKRT)	100% (8 PRT-PKRT)	46%	46%
	1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.1Jumlah pemberian izin apotik,toko obat,toko alkes dan usaha mikro obat tradisional	243	57% (55 apotek)	57% (55 apotek)	57% (55 apotek)	100%	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	125	51,44

	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.1 Jumlah apotek,toko obat,toko alkes dan umot yang diawasi	81	35 apotek	55 apotek	50 apotik, 1 toko obat, 1 umot, 115 sertifikat PIRT	91%	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	100	123,5
--	--	---	----	-----------	-----------	---	-----	--	-----	-------

		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	
		Tradisional (UMOT)								

	2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.1 Jumlah perijinan yang diberikan pada apoti,toko obat dan toko alkes dan UMOT	81	20 apotek	20 apotek	50 apotek	250%	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	85	104,9
--	---	---	----	-----------	-----------	-----------	------	--	----	-------

		<p>Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p>			55 apotek	50 apotek		55 apotek	55 apotek	
--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--

	3. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.1 Jumlah kegiatan pembinaan apotek,toko obat,toko alkes dan umot	81	20 kegiatan			100%			
		Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen apotik			55 apotek	50 apotek	90,91	55 apotek	55 apotek	

	2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2.1 Jumlah pengendalian dan pengawasan	15	17 sarana						
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2.1 Jumlah pengendalian dan pengawasan	15	17 sarana	10 sarana		170%	3 sarana		

		2.1 Jumlah PRT- PKRT yang dibina		4 PRT-PKRT	3 PRT-PKRT		133.3%	3 PRT-PKRT	7	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	
		Tangga								

	3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3.1 Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	600	112						
--	---	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--

	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3.1 Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	600	112 sertifikat	120 sertifikat	115 sertifikat	95,83%	120 sertifikat	347	57,83
--	---	---	-----	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	-----	-------

		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			120 dok	115 dokumen	95%	120 dok	120 dok	120 dok
--	--	---	--	--	---------	-------------	-----	---------	---------	---------

	4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.1 Jumlah jasa boga	350	70	70	88	126%	70	228	65,14
--	--	-----------------------------	-----	----	----	----	------	----	-----	-------

	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.1 Jumlah jasa boga	350	70 jasa boga (29 sampel, 10 depot)	70	88	126%	70	228	65,1
--	---	-----------------------------	-----	------------------------------------	----	----	------	----	-----	------

		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
--	--	---	--	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------

	5. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	5.1 Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan	600	446 sekolah, sarana	140 sekolah	120 sampel pemeriksaan	86%	20 sekolah	586	97,67
	1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	5.1 Jumlah post market	600	20 sekolah	20 sekolah			20 sekolah	60 sekolah	10

		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			20 sekolah			20 sekolah	20 sekolah	
2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	5.1 Jumlah pemeriksaan industri rumah tangga	600	436 sarana	120 sarana	120 sampel pemeriksaan	100,00%	120 sarana	676	112,67	

		Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut			1 data	1 data	100%	1 data	1 data	
		Pengawasan								
	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.4 Persentase rumah tangga perPHBS	76%	85%	85%	76%	89%	76%	79%	104%
	1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.1 Jumlah kegiatan advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan yang dilaksanakan	35	3	5 keg	1 kegiatan (Gebyar HKN)	20%	5 keg	9	25,71

	1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.1 Jumlah kegiatan advokasi pemberdayaan dan kemitraan	30	2(POSKESTREN,KO PIPU)	5 keg	1 kegiatan (Gebyar HKN)	20%	5 keg	8	26,67
		1.2 jumlah kampanye gebyar peringatan hari kesehatan	5	1 keg	1 keg	1 kegiatan (Gebyar HKN)	100%	1 keg	3 keg	60
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	
	2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.1Jumlah kader SHB yang dilakukan pembinaan	1350	270	270			270	810	

	1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2.1 Jumlah kader yang diberikan promosi PHBS	1350	270 kader	270 kader			270 kader	810 kader	
		2.2 Jumlah desa yang diberikan promosi PHBS	25 desa	304 desa	304 desa			304 desa	304 desa	
		2.3 Jumlah pondok pesantren yang dilakukan ke promosi PHBS	25 ponkes	5 ponpes	5 ponkes			5 ponkes	15 ponkes	
		2.4 Jumlah posyandu yang diberikan promosi PHBS	90 posyandu	18 posyandu	18 posyandu			18 posyandu	54	
		2.5 Jumlah sekolah yang dilakukan kegiatan promosi PHBS	25 sekolah	5 sekolah	5 sekolah			5 sekolah	15 sekolah	

		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan							
		Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen
	3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.1 Jumlah desa siaga yang dibina dan dinaikkan staratanya	30	27	27			6	54

	1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.1 Jumlah puskesmas yang diberikan bimbingan pengembangan UKBM	30 pusk/posyandu	27 pusk/ posyandu	27 pusk/ posyandu			6	54 posyandu	
		3.2 Jumlah desa siaga yang dibina dan naik stratanya	135 pusk/desa	27 pusk/desa	27 pusk/desa	18 UKBM	67%	6	51 pusk/desa siaga	37,8
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakan program dan kegiatan. Pengukuran dilaksanakan berdasarkan kinerja yang telah dilakukan.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto bisa dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2023 (TC.30)
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn N+1)	
				-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
1	AHH		v	72,73	72,83	72,93	73,03	72,93	73,25	72,93	73,03	Melebihi target
2	IKM		v	80,46	81,46	81,46	82,46	84,49	86,02	81,46	82,46	Melebihi target
3	AKI		v	114/100.000 KH	113/100.000 KH	112	111	49,94/100.000 KH (8 ibu/16.019)	65/100.000 KH (11 ibu/16.906)	112	111	Dibawah Target
4	AKB		v	4,5/1.000 KH	4,4/100.000 KH	4,3	4,2	4,43/1.000 KH (71 bayi/16.019)	4/1.000 KH (70 bayi/16.906)	4,3	4,2	Dibawah Target
5	Persentase Stunting		v	23%	21.00%;	19%	17%	3,8	1,39	19%	17%	Dibawah Target
6	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (27 puskesmas, 9 RS, 23 klinik)		v	11,8% (5 puskesmas, 2 RS)	34.00% (10 puskesmas)	55% (15 Puskesmas)	74% (20 Puskesmas)	5,08% (1 puskesmas Watukenongo.2 RS)	96% (27 puskesmas, 38 Klinik, 1 Labkesda)	55% (15 Puskesmas)	74% (20 Puskesmas)	Melebihi target
7	Persentase Desa KLB		v	64% (194 desa)	56.00% (169 desa)	47% (144 desa)	39% (119 desa)	98,36 (299 desa)	0 (0 desa)	47% (144 desa)	39% (119 desa)	Melebihi target
8	Persentase ODF (desa ODF)		v	70%	80%	80,50%	90,50%	100%	100%	80,50%	90,50%	Melebihi target
9	Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)		v	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba wiberda	swastisaba wiberda	swastisaba padapa (tahun 2022 tidak ada kegiatan penilaian Kab Sehat)	swastisaba padapa	swastisaba wiberda	swastisaba wiberda	Turun

10	Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap		v	62,5% dan 6,4%	62.50% & 6,40%	63,5% dan 6,4%	64,5% dan 6,5%	99,65% (1.461.758) dan 0,35% (5073)	128% (1.633.914) dan 0,4% (4.456)	63,5% dan 6,4%	64,5% dan 6,5%	Melebihi target utk r Jalan sedangkan r inap dibawah target
11	Persentase Indikator SPM yang mencapai target		v	75% (9 indikator)	75% (9 indikator)	84% (10 indikator)	91% (11 Indikator)	83,3%(10 indikator)	83,3%(10 indikator)	84% (10 indikator)	91% (11 Indikator)	Melebihi target
12	Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar		v	90%	90%	91	92	99,26	100%	91	92	Melebihi target
13	Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar		v	90%	90%	91	92	90%	98%	91	92	Mencapai target
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar		v	75%	75%	85%	90%	55%	52%	85%	90%	Tidak mencapai target
15	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan											
	- Apotik (96 apotek)		v	30% (28 apotek)	45% (43 apotek)	60%	75%	57% (55 apotek)	95,3% (103 Apotek)	60%	75%	Melebihi target
	- Toko Obat (2 toko obat)		v	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai target
	- Umot (1 umot)		v	100%	100%	100%	100%	100%	100% (3 Umot)	100%	100%	Mencapai target

	- PIRT (1900 dalam 5 tahun)		v	1420 PIRT (74%)/120 sertifikat	1540 (81%)/120 sertifikat	1660(87%)	1780 (93%)	112 sertifikat	312 sertifikat (82,1%)	1660(87%)	1780 (93%)	Tidak mencapai target
15	Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan		v	20% (3 PRT-PKRT)	20% (3 PRT-PKRT)	20%	20%	26% (4 PRT-PKRT)	100% (8 PRT-PKRT)	20%	20%	Mencapai target
16	Persentase Rumah Tangga BerPHBS		v	72%	73%	74%	75%	85%	75%	74%	75%	Melebihi target
17	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif		v	81,90%	82,90%	83,90%	84,90%	98%	93%	83,90%	84,90%	Melebihi target
18	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai		v	80%	82%	84%	86%	83%	87,89%	84%	86%	Melebihi target
19	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah		v	88%	89%	90%	91%	90,40%	88,94	90%	91%	Melebihi target
20	Indeks Profesionalitas ASN		v	70	72	74	76	59,1	87,46	74	76	Melebihi target
21	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		v	84,77	85,17	85,57	85,57	87,18	87,3	85,57	85,57	Melebihi target

22	Nilai RB Perangkat Daerah		v	83,99	85,17	85,57	85,57	74,77	74,77	85,57	85,57	Tidak mencapai target
23	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		v	3 inovasi (e farmasi, e presensi, permensimela)	4 inovasi	5 inovasi	5 inovasi	6 Inovasi (E Farmasi, e Presensi, permensimela, Caping Mas, Terpong Sakti, Sinergi)	5 Inovasi	5 inovasi	5 inovasi	Melebihi target
24	Pelayanan kesehatan ibu hamil		v	17.621	18.450	18.550	18.650	15.284	16.090	18.550	18.650	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
25	Pelayanan kesehatan ibu bersalin		v	16.820	17.558	17.658	17.758	14.583	14.768	17.658	17.758	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
26	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		v	16.019	16.902	17.002	17.102	14.896	14.721	17.002	17.102	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
27	Pelayanan kesehatan balita		v	65.651	66.752	66.852	66.952	58.784	75.495	66.852	66.952	Mencapai target
28	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Kelas 1 dan Kelas 7		v	31.372	39.400	40.400	41.400	31.372	131.261	40.400	41.400	Melebihi Target

29	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (Usia 15-59 tahun)	v		153.276	106.600	107.100	107.600	153.276	759.726	107.100	107.600	Melebihi Target
30	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	v		747.766	152.500	153.000	153.500	716.652	141.353	153.000	153.500	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
31	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	v		345.095	79.776	81.776	83.776	179.597	340.171	81.776	83.776	Melebihi Target
32	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	v		18.609	46.700	48.700	50.700	18.609	27.597	48.700	50.700	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
33	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	v		1.537	2.311	2.511	2.711	1.420	2.204	2.511	2.711	Tidak mencapai target 100% sesuai target SPM
34	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	v		11.600	2.713	2.913	3.113	11.600	13.559	2.913	3.113	Melebihi Target
35	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	v		20.772	12.502	13.002	13.502	13.557	21.447	13.002	13.502	Melebihi Target

Dari 23 indikator kinerja utama (IKU) yang ada, 6 indikator tidak mencapai target, antara lain indikator :

1. Pengharagaan Swastisaba (Kabupaten Sehat)
2. Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan pada rawat inap
3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan
4. Persentase penerbitan ijin PIRT
5. Indeks Profesionalitas ASN
6. Nilai RB Perangkat Daerah

Berikut gambaran capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2023 :

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2023 dapat dilihat dari data

Tabel 2.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023

AHH	2021	2022	2023
Kabupaten Mojokerto	72.59	72.93	73,25

Dari data diatas, angka harapan hidup (AHH) di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan. AHH merupakan gambaran suatu kondisi wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup di Indonesia menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini berdasarkan atas perhitungan angka harapan hidup sendiri dengan menggunakan rata-rata anak yang dilahirkan hidup, serta rata-rata anak yang masih hidup pada periode sensus. Jika angka kematian bayi tinggi, maka harapan hidup di wilayah tersebut akan rendah, begitu pula sebaliknya. Banyak hal yang dapat menentukan tinggi atau rendahnya angka harapan hidup, antara lain : jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan (mempunyai penyakit seperti hipertensi, diabetes), sosial ekonomi, hingga gaya hidup (merokok, konsumsi alcohol, kurang olahraga).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

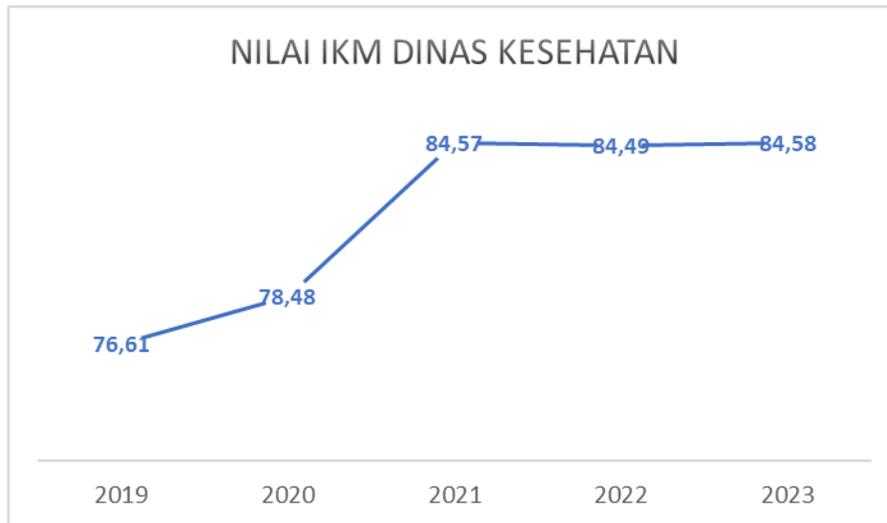
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan IKM secara mandiri di tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi Sukma-e dengan sampel yang dilaksanakan survei adalah Dinas Kesehatan, 27 Puskesmas dan Labkesda. Pada IKM ada 9 unsur yang diukur antara lain :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Data IKM Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023 bisa dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.1 IKM Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023

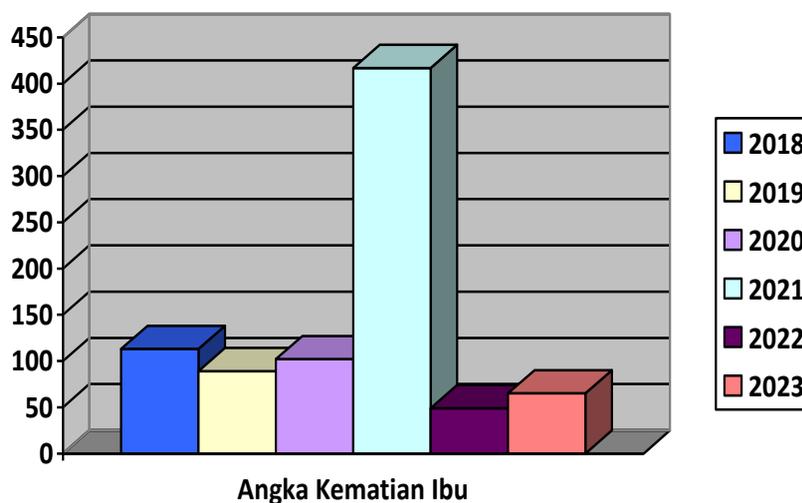
Dari grafik diatas, IKM Dinas Kesehatan mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021, namun ada penurunan pada tahun 2022 dan naik lagi pada 2023. Dari 9 unsur yang dinilai, unsur tarif/biaya mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu 3,45. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa pelayanan Kesehatan yang diberikan Dinas Kesehatan kepada Masyarakat adalah gratis tanpa ada pemungutan biaya apapun. Sedangkan unsur dengan rata-rata nilai terendah 3,22 yaitu penanganan pengaduan, saran dan masukan menjadi menjadi prioritas perbaikan untuk kedepannya. Dari hasil tersebut dapat dilakukan upaya perbaikan antara lain:

- 1)Menghimbau petugas Pelayanan pengaduan untuk menangani pengaduan sesuai SOP.
- 2)Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan pengaduan masyarakat agar lebih cepat dan tepat dalam merespon pengaduan yang masuk sehingga laporan dapat segera ditindaklanjuti.
- 3)Mensosialisasikan pada Masyarakat penerima layanan Kesehatan tentang alur pelayanan/pengaduan dan SOP penanganan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media massa dan elektronik kepada pengguna layanan.

3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Berdasarkan data capaian AKI Dinas Kesehatan Tahun 2022, terdapat 8 ibu yang meninggal atau 49,94/100.000 KH. Dimana angka tahun 2022 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan jumlah kematian ibu sebanyak 67 ibu atau 417/100.000 KH. Namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 11 ibu atau 65/100.000 KH. Berikut gambaran realisasi kematian ibu tahun 2018-2023 :



Penurunan AKI 2022 dan kenaikan yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin lebih baik dari tahun 2021. Upaya yang terus menerus dilaksanakan adalah :

- a. Mempersiapkan kesehatan ibu di 1000 Hari Pertama Kehidupan
- b. Meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang reproduksi, kampanye pemberian tablet Fe pada remaja putri,

- c. Peningkatan pemantauan kesehatan ibu hamil dengan ANC terpadu yang mewajibkan setiap Ibu hamil mengikuti pemeriksaan secara menyeluruhan, mulai gigi, laboratorium dan konsultasi gizi.
- d. Pendampingan ibu hamil resiko tinggi oleh kader kesehatan yang ada di desa
- e. Persalinan 4 (empat tangan)
- f. Pelaksanaan audit maternal perinatal untuk mengetahui semua penyebab kematian Ibu sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan pada kehamilan/persalinan yang lain.
- g. Meningkatkan koordinasi dengan penolong persalinan (bidang, dokter spesialis kandungan)
- h. Meningkatkan program inovasi tentang pelayanan ibu hamil.

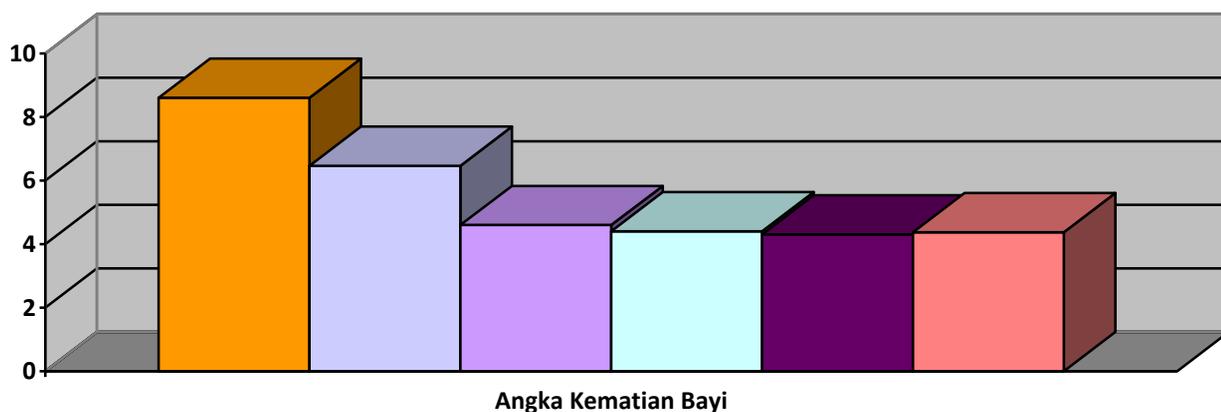
4. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut: 70 (sangat tinggi), 40 – 70 tinggi, 20-39 sedang, dan <20 rendah. Angka Kematian Bayi di tahun 2023 adalah 4/1.000 KH atau 73 bayi meninggal. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2022, angka kematian bayi mengalami peningkatan yaitu 4 dengan 70 bayi. Hal ini menunjukkan Dinas Kesehatan belum bisa menurunkan dari target yang ditetapkan tahun 2023.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk menahan laju kematian bayi tentu tidak bisa dipisahkan dari upaya penurunan kematian ibu

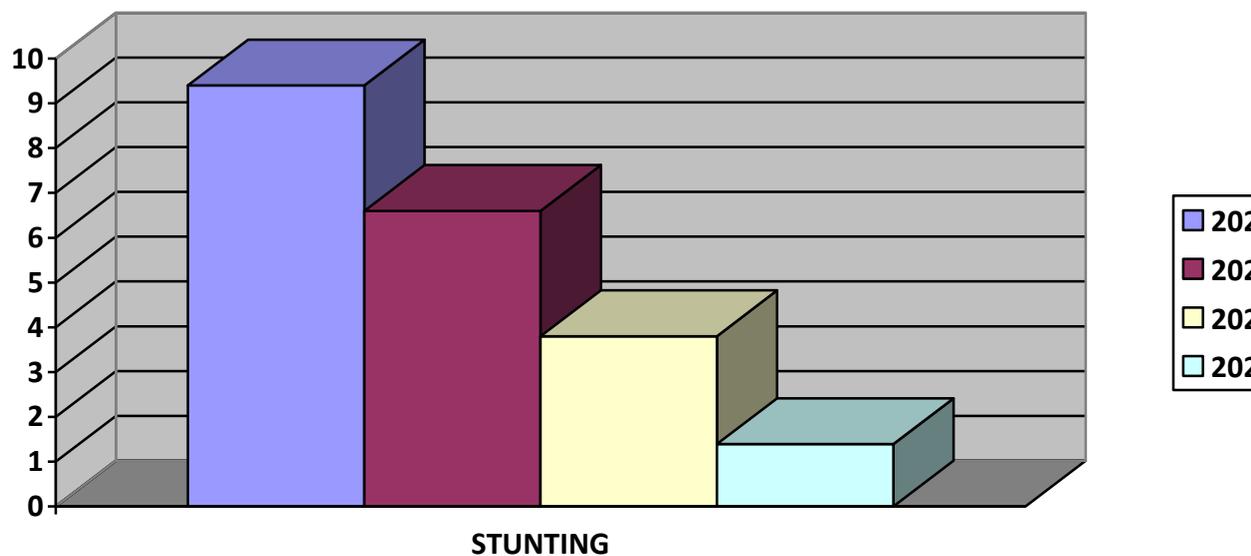
melahirkan, karena merupakan satu kesatuan. Selain penguatan ke dalam Dinas Kesehatan, yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah penguatan pada kelembagaan Satgas Penakib (Satuan Tugas Penurunan Kematian Ibu dan Bayi), penguatan jejaring sistem rujukan maternal dan neonatal dari Puskesmas ke Rumah Sakit (PONEK), penguatan keterlibatan masyarakat pada program Kesehatan Ibu dan Anak melalui P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), serta meningkatkan pelayanan kesehatan bayi, mulai melaksanakan Kunjungan neonatus secara lengkap,, peningkatan pemberian ASI Eksklusif, edukasi ke masyarakat tentang Makanan Pendamping ASI, hingga imunisasi dasar lengkap sampai bayi berusia 1 tahun. Dan berikut gambaran angka kematian bayi tahun 2018-2022 :



5. Persentase Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah.

Berikut gambaran stunting di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2022 :



Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Stunting dipengaruhi oleh pola makan, pola asuh, sanitasi dan akses air bersih. Untuk itu upaya yang dilakukan antara lain :

a. Intervensi spesifik :

Intervensi Spesifik dikelompokkan menjadi 4 yaitu untuk remaja putri, ibu hamil, anak usia 0-23 bulan dan anak usia 24-59 bulan. Untuk Remaja Putri dan Calon Pengantin adalah pemberian Tablet Tambah Darah untuk Remaja Putri, Pemeriksaan kesehatan dan pemberian MMN. Untuk Ibu Hamil adalah suplementasi Tablet Tambah Darah untuk Remaja Putri dan Ibu Hamil, Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik dan Kelompok miskin, Pemeriksaan Kehamilan/Ante Natal Care untuk Ibu Hamil, Promosi dan konseling menyusui, Promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), Pemantauan pertumbuhan, Suplementasi kapsul vitamin A, Imunisasi, Suplementasi zinc. Balita dengan intervensi balita wasting dengan PMT Balita (Biskuit, PMT Lokal, susu), Pendampingan Balita Gizi Buruk, akses jaminan kesehatan, pelayanan KB serta Peningkatan sanitasi dan akses air bersih. Peningkatan sanitasi dan akses air bersih, telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yaitu dengan melaksanakan pembangunan jamban keluarga sebanyak 181

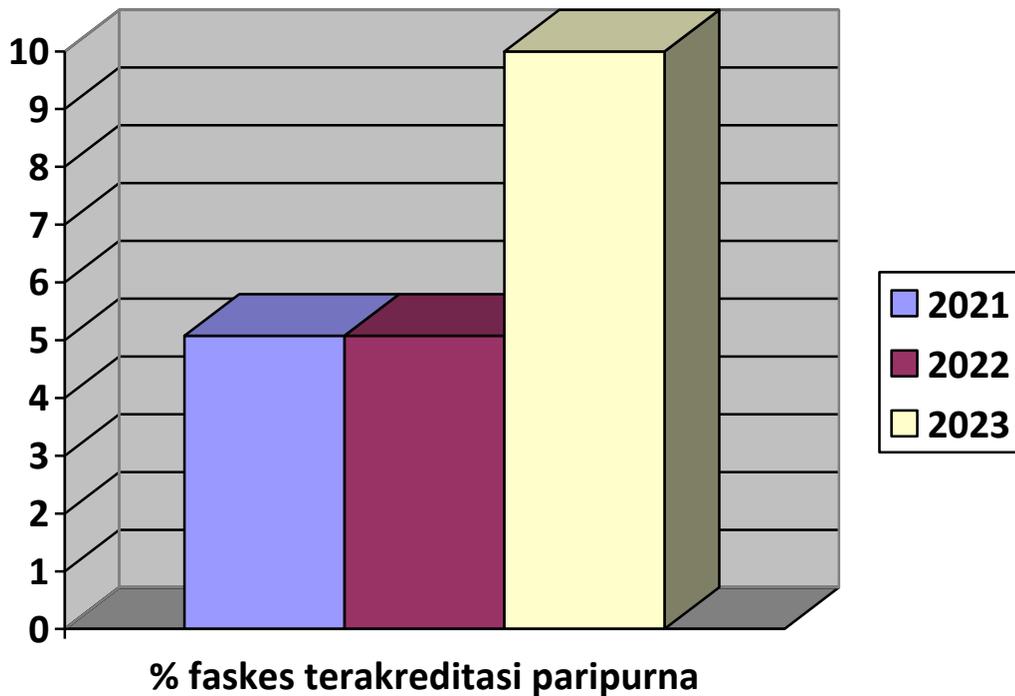
jamban dari dana DID, APBD serta tambahan pembangunan jamban sebanyak 7 ribu jamban dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, hingga Kabupaten Mojokerto telah bebas ODF. Sanitasi dan Akses Air Bersih ditingkatkan akan menjauhkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan.

- b. Pengadaan sarana prasarana pengukuran tumbuh kembang balita yaitu antropometri yang telah teralokasi ke seluruh posyandu di kabupaten Mojokerto.
- c. Pengadaan susu balita gizi buruk dan kurang sebanyak 3535 kotak
- d. Pengadaan susu ibu hamil 3230 kotak
- e. Kampanye “Isi Piringku” adalah dengan pola konsumsi dengan gizi seimbang. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein (baik nabati maupun hewani) dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat.
- f. Sosialisasi penyuluhan tentang pentingnya pola asuh. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan empat kali selama kehamilan. Bersalin di fasilitas kesehatan, lakukan inisiasi menyusui dini (IMD) dan berupayalah agar bayi mendapat colostrum air susu ibu (ASI) dan memberikan ASI Eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan.
- g. Meningkatkan inovasi program dengan mereplikasi inovasi antara inovasi Jumat Ceria, Caping Mas, Mama mita (memantau menu gizi ibu hamil dan balita dengan *cooking class*).

6. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna

Akreditasi Fasilitas Kesehatan telah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan 27 Puskesmas, 1 Labkesda, 11 Rumah sakit dan 38 Klinik yang telah terakreditasi. Dari 27 Puskesmas dan 38 klinik yang terakreditasi, ada 25 puskesmas yang terakreditasi paripurna, 2 puskesmas yang terakreditasi utama, 1 rumah sakit terakreditasi

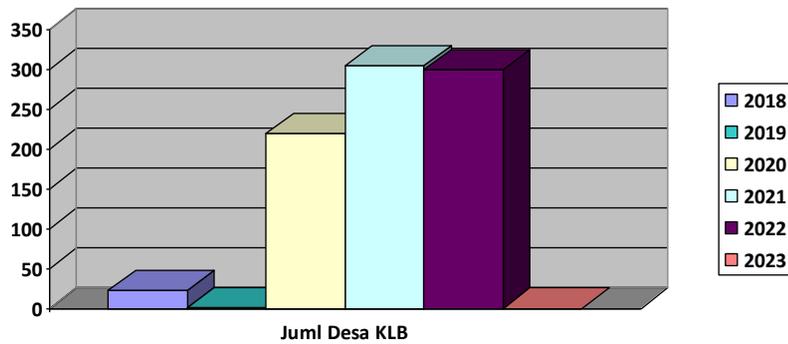
perdana, 1 rumah sakit terakreditasi madya, 7 rumah sakit terakreditasi paripurna, 2 rumah sakit terakreditasi Utama, 34 klinik terakreditasi paripurna, 4 klinik terakreditasi utama. Berikut gambaran fasilitas kesehatan yang telah diakreditasi tahun 2018-2022 :



Meskipun sudah banyak fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi, namun Dinas Kesehatan tetap melaksanakan peningkatan mutu layanan yaitu dengan mengadakan workshop mutu, pelatihan standar elemen penilaian akreditasi puskesmas.

7. Persentase Desa KLB yang ditangani yaitu jumlah desa yang mengalami kejadian luar biasa. Dan pada tahun 2021, jumlah desa yang mengalami KLB, yaitu 304 desa. Jika dibandingkan dengan capaian 2022, jumlah desa yang terdampak KLB menurun yaitu 299 desa. Dimana untuk tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu 194 desa. Hal ini dikarenakan pada awal tahun 2022, masih tinggi kasus Covid-19 dengan varian omicron. Sedangkan pada tahun 2023 sudah tidak ada desa yang mengalami KLB.

Berikut gambaran Persentase Desa (KLB) tahun 2018-2022 :



8. Persentase ODF (desa ODF)

Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan.

Indikator ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan kehidupan yang baik dengan menerapkan hidup bersih dan sehat. Sesuai dengan target yang ditetapkan tahun 2023, desa ODF yang harus dicapai di Kabupaten Mojokerto adalah 100% atau 304 desa seiring dengan tujuan penurunan angka stunting di Kabupaten Mojokerto. Upaya yang telah dilakukan pada 2023 adalah dengan pembangunan jamban keluarga dan jamban komunal yang tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, namun juga perangkat daerah lainnya untuk membantu pemiciuan, maupun pelaksanaan pembangunan jamban seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Sehingga pada tahun 2023 ini Kabupaten Mojokerto telah mencapai target 100% desa telah ODF dan telah ditetapkan sebagai Kabupaten ODF.

9. Penghargaan swastisaba padapa

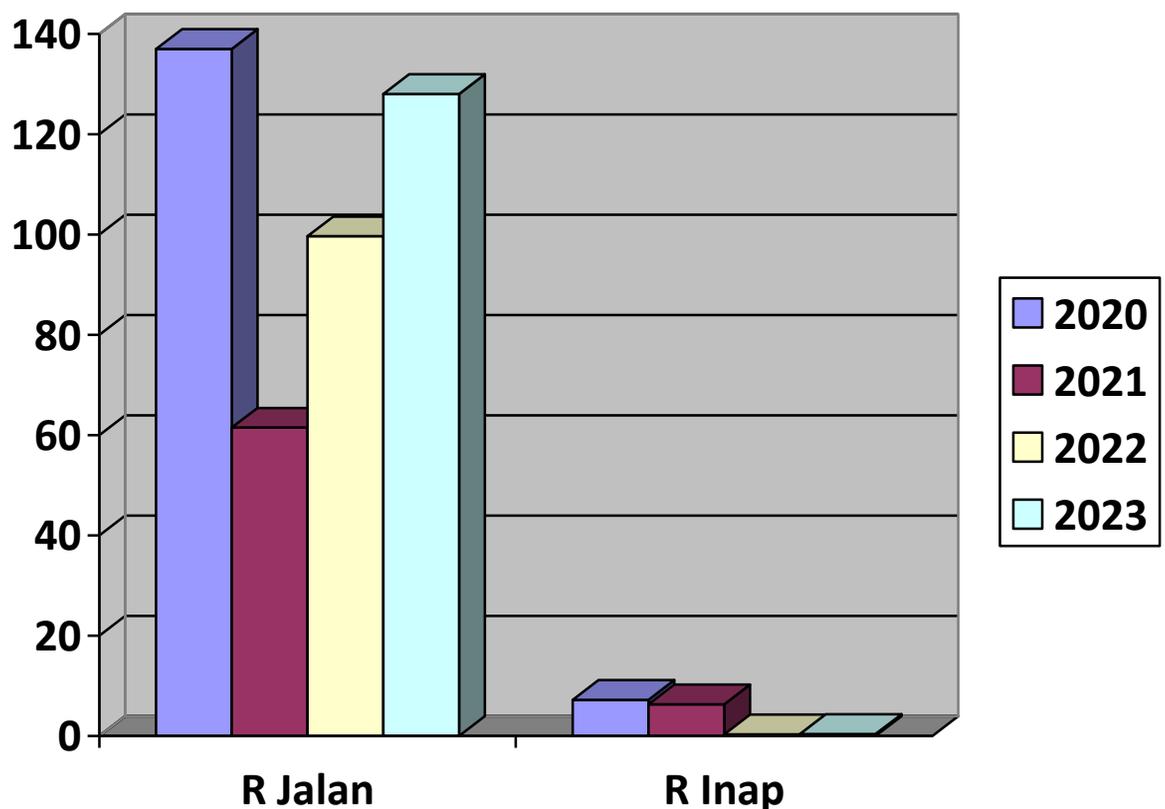
Program Kabupaten Kota Sehat (KKS) bertujuan agar tercapai kondisi Kabupaten Kota bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain sehingga dapat meningkatkan sarana, produktivitas dan perekonomian masyarakatnya. Penghargaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) bukanlah sebuah lomba melainkan apresiasi pemerintah pusat pada pemerintah daerah yang

sudah menyelenggarakan KKS sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor:1138/Menkes/PB/VIII/2005. Penyelenggaraan Program KKS melibatkan banyak lintas sektor dan lintas program melalui Tatanan dalam KKS. Ada 9 tatanan KKS, yaitu Kehidupan Masyarakat Yang Sehat Mandiri, Permukiman dan Fasilitas Umum, Satuan Pendidikan, Pasar Rakyat, Perkantoran dan Perindustrian, Pariwisata Sehat, Transportasi dan Tertib lalu Lintas Jalan, Perlindungan Sosial dan Pencegahan dan Penanganan Bencana. Setiap tahun genap, dilakukan verifikasi KKS tingkat provinsi. Sementara penghargaan diberikan setiap tahun ganjil. Kriteria penghargaan adalah Padapa kualifikasi pemantapan (2 tatanan); Wiwerda untuk kualifikasi pembinaan (3 tatanan); dan Wistara untuk kualifikasi pengembangan (5 tatanan). Pada tahun 2022, ditargetkan kabupaten Mojokerto mengikuti penilaian Kabupaten Sehat untuk mendapatkan penghargaan swastisaba padapa, direncanakan pada tahun 2023 Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan penilaian untuk 9 tatanan dan ditargetkan mendapatkan penghargaan swastisaba wiwerda. Namun pada tahun 2023 ini penghargaan yang diperoleh turun menjadi padapa. Hal ini dikarenakan adanya perubahan tatanan dan passing grade, jika ada satu tatanan yang nilainya kurang maka akan mempengaruhi nilai tatanan yang lainnya. Salah satu tatanan yang bernilai kurang yaitu pada Kawasan pariwisata sehat.

10. Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap

Jumlah kunjungan pasien rawat jalan adalah jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu. Sedangkan jumlah kunjungan pasien rawat inap adalah jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu. Indikator ini

dipergunakan untuk melihat kualitas dari fasilitas kesehatan yang ada. Sesuai dengan pembagian pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jumlah masyarakat yang berkunjung ke puskesmas menjadi indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Karena puskesmas adalah pelaksanaan pembanunan kesehatan di promotif dan preventif. Semakin banyak yang berkunjung di puskesmas, perlu dilakukan pendalaman apakah kegiatan promotif dan preventif kurang berjalan dengan efektif sehingga banyak masyarakat yang sakit. Sedangkan kunjungan rawat inap dipergunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan rawat inap baik di puskesmas maupun di RS. Seperti data kunjungan rawat jalan dan rawat inap di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020-2023 :



Persentase kunjungan rawat jalan tahun 2020 adalah 137%, 2021 61,5%, 2022 99,6% dan tahun 2023 adalah 128%. Sedangkan jumlah kunjungan rawat inap tahun 2020 adalah 7,2%, tahun 2021 6,5%, tahun 2022 0,35% dan tahun 2023 adalah 0,4%. Untuk kunjungan rawat jalan terdapat peningkatan dari tahun 2021 sedangkan kunjungan rawat inap terdapat penurunan pada tahun 2020 hingga 2022, kemudian mengalami sedikit kenaikan di 2023. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih pengobatan alternative dibandingkan dengan

memeriksa diri ke fasilitas kesehatan, selain itu turunnya minat masyarakat untuk rawat inap di puskesmas karena puskesmas pernah menjadi ruang isolasi pasien Covid-19.

11. Persentase Indikator SPM yang mencapai target

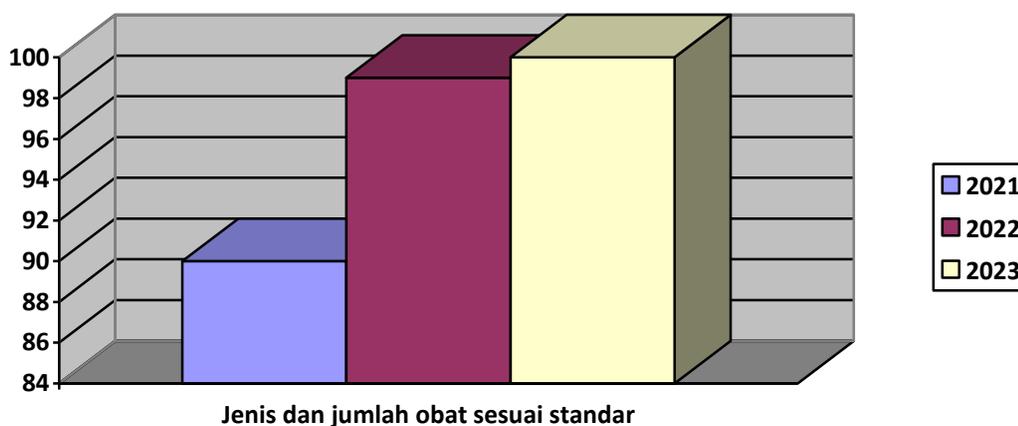
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM Bidang Kesehatan meliputi :

- 1) setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar;
- 2) setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai dengan standar;
- 3) setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- 4) setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- 5) setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar;
- 6) setiap warga negara Indonesia usia 15 (lima belas) sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar;
- 7) setiap warga negara Indonesia usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar;
- 8) setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- 9) setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- 10) setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- 11) setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai dengan standar; dan
- 12) setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai dengan standar.

Mengingat SPM Bidang kesehatan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk penyediaan pelayanan dasar, maka dilakukan penilaian dari 12 indikator yang ada, berapa yang telah mencapai target. Karena itu akan memberikan gambaran sejauh mana pemerintah daerah menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Pada tahun 2022, ditetapkan target 9 indikator SPM bidang kesehatan yang mencapai target, dan hasil pencapaian tahun 2022, jumlah indikator yang mencapai target ada 10 indikator (83,3%). Tahun 2022 juga menunjukkan adanya peningkatan capaian indikator yang tercapai jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 9 indikator yang tercapai (75%). Namun pada tahun 2023, jumlah indikator yang tercapai sama dengan tahun 2022. Faktor pendorong keberhasilan peningkatan jumlah indikator yang melebihi target adalah tersedianya alat kesehatan, bahan medis habis pakai sehingga bisa dilaksanakan kegiatan skrining kesehatan sesuai dengan target sasaran yang ada.

12. Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar

Indikator tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas. Upaya yang dilakukan adanya dengan penyediaan obat dan vaksin sesuai dengan formulasi nasional. Obat-obat yang dipilih sebagai obat indikator merupakan obat pendukung program kesehatan ibu, kesehatan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial. Selain dengan penyediaan obat dan vaksin untuk mendukung capaian indikator tersebut juga dilaksanakan pembinaan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi dan puskesmas. Pada tahun 2023, ditetapkan target persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar adalah 99% dan pencapaian kinerja di tahun 2023 adalah 100%. Sedangkan dibandingkan capaian tahun 2022 yaitu 99%, capaian 2023 telah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menyediakan obat baik jenis dan jumlah yang sesuai dengan standar. Dengan demikian pelayanan kesehatan di puskesmas dapat dilaksanakan secara paripurna. Berikut gambaran persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar tahun 2021-2023:



13. Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan sesuai standar

Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan merupakan peralatan yang wajib dimiliki untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang paripurna. Untuk menunjang hal tersebut pada tahun 2023 ditetapkan target persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar adalah 90%. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2023 telah dilaksanakan pengadaan alat kesehatan yang mendukung program, mulai pengadaan stetoskop, tensimeter, alat pengukur tinggi badan, alat pengukur berat badan, alat pemeriksa gula darah, kolesterol, asam urat hingga pengadaan USG 2D. Semua peralatan kesehatan yang diadakan bertujuan untuk meningkatkan akurasi diagnosa suatu penyakit, sehingga dapat dilakukan pengobatan yang adekuat.

14. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar

Sesuai Undang-undang no 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 21 menyatakan bahwa “Pemerintah mengatur perencanaan, Pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dalam SKN, pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dilakukan dengan 4 pokok yaitu : (1) perencanaan SDM Kesehatan, (2) pengadaan SDM Kesehatan, (3) pendayagunaan SDM Kesehatan serta (4) pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan. Dalam upaya pemenuhan SDM kesehatan di era pelayanan kesehatan semesta harus mencakup pada empat faktor yaitu: ketersediaan jumlah

dan jenis SDM Kesehatan, pemerataan SDM Kesehatan, kompetensi/kualitas SDM Kesehatan dan Kinerja SDM Kesehatan. Kondisi saat ini dalam upaya memenuhi SDM Kesehatan masih ditemukan gap pada ke empat indikator SDM Kesehatan tersebut sehingga banyak yang harus dilakukan dengan fokus pada percepatan pemenuhan SDM Kesehatan agar akses masyarakat pada SDM Kesehatan lebih terjangkau lagi sehingga pencapaian pelayanan kesehatan semesta bisa cepat direalisasikan. Untuk memperkecil gap tersebut, diperlukan upaya-upaya pemenuhan, misalnya pada ketersediaan SDM Kesehatan maka diperlukan perencanaan dan pemenuhan tenaga kesehatan yang memenuhi standar. Standar pemenuhan nakes di puskesmas adalah 9 nakes yang terdiri dari dokter umum, gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat,kesling, farmasi, gizi dan laborat/atml. Untuk memenuhi itu belum semua puskesmas karena tidak adanya alokasi/formasi untuk cpns. Hal ini sesuai dengan capaian kinerja tahun 2022, dimana ditargetkan ketersediaan nakes di faskes adalah 75% faskes telah memiliki nakes yang terstandar, namun capaian di 2023 hanya 52%. Beberapa faktor yang menyebabkan capaian 2023 tidak bisa mencapai target, diantaranya tidak adanya formasi cpns, banyaknya nakes yang pensiun dan belum ada nakes yang menggantikan. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi pelayanan kesehatan di Puskesmas. Upaya yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah dengan merekrut tenaga professional melalui dana BLUD Puskesmas.

15. Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan

- Apotik (108 apotek)
- Toko Obat (2 toko obat)
- Umot (1 umot)
- PIRT (120 sertifikat)

Dalam menunjang pelayanan kesehatan yang paripurna, tidak hanya diperlukan ketersediaan alat kesehatan, obat dan vaksin yang memenuhi standar dalam jumlah dan jenis. Namun, kegiatan Pengawasan pada pelaku penyedia obat dan makanan juga perlu ditingkatkan. Untuk mewujudkan kinerja pengawasan pada penyedia obat dan makanan ditetapkan indikator pengawasan dan pengendalian

yang meliputi pengawasan apotek, toko obat, UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) dan penerbitan sertifikat PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Pengawasan ini penting dilakukan oleh Dinas Kesehatan mengingat obat dan makanan yang beredar di masyarakat harus dipastikan tidak berbahaya dan menimbulkan masalah kesehatan. Dari target kinerja yang ditetapkan tahun 2023, dari 4 indikator, ada 3 indikator yang mencapai target, yaitu pembinaan apotek yang ditargetkan 55 apotek, di tahun 2023 bisa melaksanakan pembinaan 103 apotek. Indikator selanjutnya yang mencapai target adalah pengawasan/pembinaan toko obat dan UMOT. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Mojokerto hanya tersedia 1 toko obat dan 2 UMOT. Sehingga memudahkan bagi tenaga farmasi di Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan. Sedangkan indikator penerbitan sertifikat PIRT yang ditargetkan mampu menerbitkan 120 sertifikat, di tahun 2023 bisa menerbitkan 312 sertifikat. Hal ini dikarenakan jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan izin edar PIRT hanya 312 orang. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan izin edar adalah dengan koordinasi dengan petugas sanitarian puskesmas untuk menyisir di wilayah puskesmas mendata pelaku usaha pangan yang belum mempunyai izin edar.

16. Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan.

Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro (DIV) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) merupakan komponen penting di samping tenaga kesehatan dan obat dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, disebutkan bahwa Alkes dan PKRT yang beredar dan digunakan dalam pelayanan kesehatan haruslah memiliki izin edar dan terjamin mutu, keamanan, kemanfaatan dan terjangkau. Sampling Alkes dan PKRT adalah kegiatan pengambilan sample produk Alkes dan PKRT di peredaran untuk selanjutnya dilakukan pengujian terhadap konsistensi keamanan, manfaat dan mutu produk. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan produk Alkes dan PKRT di laboratorium yang terakreditasi oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk memastikan kesesuaian

produk Alkes dan PKRT yang beredar sesuai dengan standard yang berlaku. Tujuannya adalah menjamin konsistensi mutu produk pada pasca pemasaran (*post-market*), melindungi masyarakat dari penggunaan produk yang tidak memenuhi syarat keamanan serta, mendeteksi sedini mungkin adanya produk palsu dan produk yang tidak mempunyai Nomor Izin Edar (NIE). Pada tahun 2022, pada kegiatan pengawasan toko alkes dan PKRT ditargetnya 3 PRT-PKRT, dan capaian 2023 adalah 8 PRT-PKRT (Perusahaan rumah tangga dan perbekalan kesehatan rumah tangga).

17. Persentase Rumah Tangga BerPHBS

PHBS di Tatanan Rumah Tangga adalah upaya untuk menyadarkan keluarga dan masing masing anggota keluarga agar memiliki kemaunan dan kemampuan dalam mempraktikkan PHBS. Sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Rumah tangga atau keluarga yang sehat dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan PHBS dan menciptakan dukungan lingkungan yang sehat. Rumah tangga atau keluarga yang sehat merupakan aset utama pembangunan yang perlu dipelihara terus menerus, ditingkakan dan dilindungi kesehatannya. Sehingga perlu dilakukan upaya upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan anggota rumah tangga atau anggota keluarga untuk melaksanakan PHBS, dan ikut berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat.

Bahwa rumah tangga atau keluarga sehat merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkakan dan dilindungi kesehatannya. Beberapa anggota rumah tangga mempunyai masa rawan terkena gangguan berbagai penyakit. Angka kesakitan dan kematian penyakit infeksi dan non infeksi dapat dicegah dengan PHBS. Rumah Tangga Ber-PHBS adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di Rumah Tangga, yaitu : (1) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, (2) Memberi bayi ASI Eksklusif, (3) Menimbang balita setiap bulan, (4) Menggunakan air bersih, (5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, (6) Menggunakan jamban sehat (7) Memberantas jentik di rumah sekali seminggu (8) Makan buah dan sayur setiap hari (9) Melakukan Aktivitas Fisik setiap hari, (10) Tidak merokok di dalam

rumah. Dari capaian tahun 2023, persentase rumah tangga yang berPHBS adalah 75% melebihi target yang ditetapkan yaitu 73%. Hal ini dikarenakan gencarnya promosi kesehatan terkait PHBS baik melalui media cetak, elektronik, penyuluhan tatap muka dengan masyarakat maupun melalui media sosial. Sehingga semakin banyak masyarakat/rumah tangga yang menerapkan 10 indikator PHBS.

18. Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif

UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) merupakan wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan bimbingan petugas puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. Melalui pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan diharapkan masyarakat mampu mengatasi sendiri masalah kesehatan yang mereka hadapi. Yang mana UKBM ini mencakup kemampuan untuk memelihara dan melindungi diri baik secara individual, kelompok dan atau masyarakat dari ancaman kesehatan. UKBM merupakan wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, UKBM diharapkan dapat berkembang kearah bentuk yang ideal yaitu bentuk yang lestari dan mandiri. Ditopang oleh kemampuan pengorganisasian dan pendanaan oleh masyarakat. Jenis UKBM antara lain : Posyandu balita, Posyandu Lansia, Posyandu remaja, Poliklinik kesehatan Desa, Pos Obat Desa, Pos Gizi, Pos penyuluhan KB, PosKestren, Saka Bhakti Husada, Posbindu, Dana Sehat, Pos UKK, Pansimas dan karang taruna husada. Capain kinerja persentase UKBM yang aktif tahun 2022 adalah 93% dari target 82,90%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran tinggi untuk dapat ikut serta dalam pembangunan kesehatan. Begitu juga dengan dukungan pemerintah desa yang cukup tinggi. Dibuktikan dengan adanya peningkatan strata dari posyandu. **Posyandu kenaikan strata Madya ke purnama sebanyak 108 posyandu dan posyandu strata Purnama yang naik ke strata mandiri ada 42 posyandu.**

19. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai

Program yang ada di perangkat daerah adalah wajib untuk dilaksanakan dan diupayakan memenuhi target yang telah ditetapkan. Karena pencapaian program menjadi tolak ukur kinerja dari perangkat daerah. Persentase indicator program perangkat daerah yang tercapai terdiri dari indicator kinerja utama (IKU) kepala Dinas Kesehatan yang

terdapat pada Perjanjian Kinerja. IKU Dinas Kesehatan terdiri dari 23 indikator yang mana dari 23 indikator terdapat 17 indikator yang mencapai target (88%). Capaian tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu 80%. Capaian yang mampu melebihi target didukung dengan komitmen Dinas Kesehatan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan.

20. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah

Realisasi anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (*budget*). Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi. Pada tahun 2023, capaian realisasi anggaran adalah 88,94% yang mana kurang target 2023 yaitu 90%. Dan apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, yaitu 2020-2021, telah terjadi penurunan capaian realisasi yaitu di tahun 2020 83,46% dan di tahun 2021 adalah 79,37% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebagaimana terdapat pada grafik berikut :



Hal ini dikarenakan anggaran Dinas Kesehatan terkena Rasionalisasi sehingga berdampak pada realisasi penyerapan anggaran.

21. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat

digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup :

- (1) Dimensi kualifikasi : mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
- (2) Dimensi kompetensi. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (3) Dimensi kinerja. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Tingkat Profesionalitas ASN adalah : a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100; b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90; c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80; d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Dari capaian IP ASN Dinas Kesehatan tahun 2023 hanya 87,46(sesuai data per Juni 2023), dimana capaian tersebut mencapai target yang ditetapkan yaitu 72.

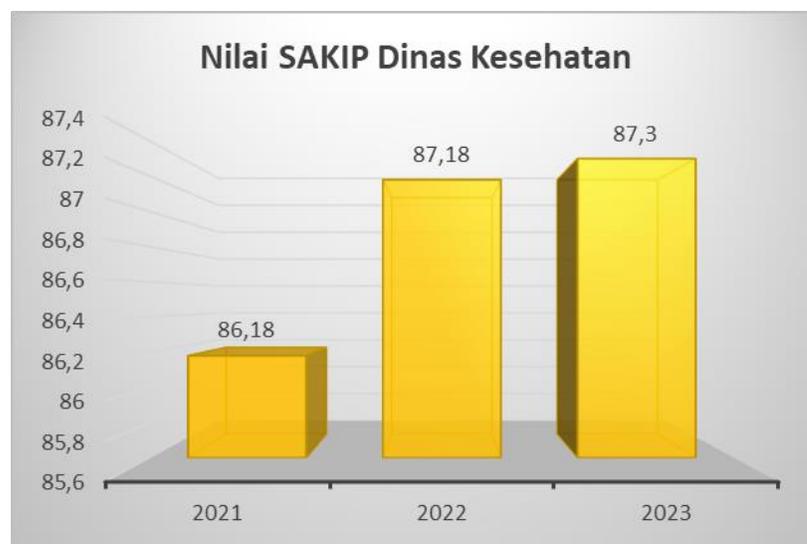
22. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi SAKIP ini dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan.

Dari SAKIP inilah akan diketahui bahwa setiap rupiah anggaran yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebenarnya memberikan manfaat atau tidak kepada masyarakat. Dalam makna yang lain evaluasi SAKIP adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah kepada publik atas penggunaan keuangan negara. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan

rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Berdasarkan data capaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan tahun 2023, terjadi peningkatan dari target yang ditetapkan. Target 2023 adalah 84,01 dan nilai yang dicapai 2023 adalah 87,30. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020-2023, terjadi peningkatan nilai SAKIP. Sebagaimana tergambar pada grafik berikut :



Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

23. Nilai RB Perangkat Daerah

Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurus segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik

kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap **8 area perubahan** terdiri dari: Organisasi (Hasil yang diharapkan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran), Tatalaksana (Hasil yang diharapkan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan, sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), Peraturan Perundang-undangan (Hasil yang diharapkan: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, Sumber Daya Manusia Aparatur (Hasil yang diharapkan: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.), Pengawasan (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN), Akuntabilitas (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi), Pelayanan publik (Hasil yang diharapkan: Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat), *Mindset* dan *cultural Set* Aparatur (Hasil yang diharapkan: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).

Pada tahun 2023, target nilai RB adalah 84,01 namun capaian 2023 adalah 74,77 dan nilai tersebut jika dibandingkan capaian 2022 hasilnya sama yang mana capaian 2022 adalah 74,77. Untuk itu, pada tahun 2024 perlu ada peningkatan evaluasi pada 8 area perubahan.

24. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Dalam melaksanakan program kesehatan tentunya tidak semua program bisa berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Karena tidak sedikit kendala yang dihadapi baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknis pelaksanaan program. Untuk melaksanakan program kesehatan yang dapat mencapai target, terkadang dibutuhkan inovasi/ terobosan dalam pelayanan kesehatan. Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan telah menetapkan target 5 inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi, artinya telah dilaksanakan dan berkelanjutan. Bahkan telah direplikasi di unit kerja/uptd yang ada di Dinas Kesehatan. Lima inovasi yang ditargetkan tahun 2023 adalah

- 1) JUMAT CERIA (Cantik, Enerjik, Rajin, Inovatif dan Aktif) merupakan inovasi Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan stunting yaitu mencegah anemia pada remaja putri. Jumat Ceria dikemas dalam agenda rutin pada hari Jumat untuk kampanye minum tambah darah secara serentak pada remaja putri di sekolah SMP, SMA sederajat di Kabupaten Mojokerto.
- 2) JUMAT BANGKIT (Pembinaan Kesehatan Instansi Terpadu) merupakan inovasi Dinas Kesehatan dalam upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit tidak menular di kalangan pegawai pemerintah Kabupaten Mojokerto. Inovasi ini dikemas dalam agenda rutin skrining Kesehatan pegawai di instansi-instansi pemerintah se-Kabupaten Mojokerto di hari Jumat pertama setiap bulan. Skrining yang dilakukan meliputi pengukuran lingkaran perut, tinggi dan berat badan, serta pengukuran tingkat resiko penyakit tidak menular seperti tes gula darah, kolesterol, dan asam urat. Jumat Bangkit juga menyediakan layanan konsultasi untuk mendapatkan gambaran hasil pemeriksaan.
- 3) SEHATI (Selasa Sehat Turunkan Stunting, AKI, AKB) merupakan inovasi Dinas Kesehatan sebagai upaya menekan angka stunting. Sehati digelar di Desa dengan peserta ibu dan balita. Dalam agenda Sehati ibu didedukasi agar mencukupi gizi putra-putrinya mulai dalam kandungan hingga usia 5 tahun.
- 4) SIP ONLINE adalah inovasi Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat khususnya perijinan tenaga Kesehatan. SIP online dihadirkan dalam bentuk website lengkap dengan *link* yang dapat diakses publik untuk pengajuan SIP dan monitoring status berkas perijinan.
- 5) TEROPONG SAKTI (Teropong Saat Anak Kelainan Mata dan Refraksi) adalah salah satu inovasi Puskesmas Ngoro yang telah meraih Top 30 Inovasi Terpuji dalam Kovablik Jatim tahun 2023. Teropong Sakti merupakan inovasi untuk mendeteksi kelainan dan gangguan refraksi mata pelajar yang dilakukan Puskesmas Ngoro dengan melaksanakan giat keliling ke sekolah SD, SMP dan SMA sederajat untuk pemeriksaan mata pelajar.

Pencapaian inovasi yang melebihi target di tahun 2023 adalah salah satu bukti dari komitmen Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di tahun 2023.

Dari kinerja SPM Bidang Kesehatan, terdapat capaian kinerja SPM yang masih belum mencapai target. Dari 12 indikator yang tercapai target pelayanan 100% ada 6 indikator yaitu :

- a. Pelayanan Kesehatan Balita
- b. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7
- c. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- d. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi
- e. Pelayanan kesehatan Orang dengan TB
- f. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Sedangkan 6 indikator lainnya berada di bawah 95%. Dari indikator yang capaiannya dibawah 95% terdapat 1 indikator yang capaiannya dibawah 70%, yaitu indikator pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus hanya 59% dan indikator pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang hanya mencapai 58,23%. Hal ini disebabkan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus hanya memeriksa sasaran kunci saja, masih banyak masyarakat yang tidak memeriksakan di fasilitas kesehatan. Kedepannya perlu dilaksanakan pemeriksaan pada seluruh masyarakat. Namun ada tantangan yaitu pemeriksaan harus dilaksanakan secara sukarela atau tanpa paksaan.

Upaya yang dilaksanakan adalah memperluas sasaran pelayanan kesehatan orang dengan penderit Diabetes Mellitus tidak hanya populasi kunci tapi seluruh masyarakat melalui skrining kesehatan, pengadaan alat kesehatan menunjang pelayanan kesehatan penderita Diabetes untuk revitalisasi alkes pengukur kadar gula darah sehingga hasilnya bisa akurat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Melihat kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022 dan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, berikut isu-isu strategis yang perlu diperhatikan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan ke depan, yaitu tahun 2025 adalah:

1. Penurunan AKI dan AKB yang masih lambat
2. Prevalensi Stunting yang masih tinggi

3. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat
4. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat
5. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis Tenaga
6. Pemenuhan Peralatan Kesehatan yang terstandar yang belum optimal
7. Pengembangan Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan yang masih belum optimal.

Untuk mengimplementasikan isu-isu strategis tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menekankan pada penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Pemerataan Pelayanan

Keterjangkauan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Hal ini terkait dengan usaha menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dengan dilengkapinya sarana dan prasarana di Puskesmas serta jaringannya seperti Ponkesdes dan Polindes maka dapat memberikan pelayanan yang merata. Walaupun di daerah yang jauh dari kota atau di wilayah pegunungan. Dengan adanya perawat Ponkesdes dengan anggaran sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan kepada penurunan angka kematian ibu maupun angka kemayian bayi.

Tantangan dan hambatan yang ada adalah tenaga kesehatan terutama perawat terkadang tidak mau ditempatkan di daerah terpencil yang jauh dari pusat keramaian, sehingga hal yang perlu dilakukan adalah memberikan fasilitas kesehatan yang lebih baik agar tenaga kesehatan mau bekerja dan melayani masyarakat terutama yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan.

Tahun 2025 fokus perencanaan pemerataan pelayanan kesehatan tetap pada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, yaitu pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas dan

Pustu, diharapkan peningkatan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dapat merata ke semua lapisan masyarakat. Pembangunan ini bertahap sampai tahun selanjutnya

b. Kualitas Pelayanan

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki 27 Puskesmas yang tersebar di 18 Kecamatan yang ada. Untuk peningkatan kualitas pelayanan sejak tahun 2021, 27 Puskesmas di kabupaten Mojokerto telah berubah status pengelolaannya menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Diharapkan dengan perubahan ini, puskesmas memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan.

Selain pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan juga menjadi prioritas. Karena yang sampai saat ini masih kualitas sumber daya manusia masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memasuki masa pensiun tetapi belum ada penggantinya adalah salah satu penghambat pelayanan kesehatan. Ketersediaan dokter umum dan dokter gigi yang juga sangat terbatas di Puskesmas.

2.4 Review Terhadap RKPD

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Pagu anggaran indikatif tahun 2024 untuk urusan kesehatan yang direncanakan dalam RKPD sebesar Rp. 301.772.067.889,-. Sedangkan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan membutuhkan dana sebesar Rp. 301.772.067.889,- Hal ini bisa dilihat pada tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (TC.31)
Kabupaten Mojokerto

Dinas Kesehatan

No	Rancangan Awal RKPD					Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisa Kebutuhan					Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan		86,37 (A)	172.784.856.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan		86,37 (A)	172.784.856.000,00			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik	86%	25.000.000,00	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik	86%	25.000.000,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.500.000,00		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.500.000,00		
			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Dinkes	1 dok (Renja)	7.500.000,00				Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Dinkes	1 dok (Renja)	7.500.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun	2 dok	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun	2 dok	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dok RKA Perubahan yang disusun	1 dok	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dok RKA Perubahan yang disusun	1 dok	0		

		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA	4 kali	10.000.000		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA	4 kali	10.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA	4 kali	0		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA	4 kali	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah keg koordinasi penyusunan lap kinerja	6 kali	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah keg koordinasi penyusunan lap kinerja	6 kali	0	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dok evaluasi yang disusun		7.500.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dok evaluasi yang disusun		7.500.000	
				Jumlah dok lap kinerja Dinas Kesehatan (lap Renja, LKJIP, SAKIP, PMPRB, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renstra)	7 dok	7.500.000				Jumlah dok lap kinerja Dinas Kesehatan (lap Renja, LKJIP, SAKIP, PMPRB, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renstra)	7 dok	7.500.000	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran PD	91%	116.033.856.000,00	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran PD	91%	116.033.856.000,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan		100.664.046.000,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan		100.664.046.000,00	
				Dinkes	14 dok SPM	65.714.046.000				Dinkes	14 dok SPM	65.714.046.000	
				Insentif	14 dok SPM	24.630.190.000				Insentif	14 dok SPM	24.630.190.000	
				BOP Dinkes dan Pusk	14 dok SPM	10.319.810.000				BOP Dinkes dan Pusk	14 dok SPM	10.319.810.000	

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.319.810.000,00		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.319.810.000,00	
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan pengamanan BMD	12 keg	50.000.000,00	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan pengamanan BMD	12 keg	50.000.000,00	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah kegiatan pengamanan BMD	12 keg	35.000.000,00		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah kegiatan pengamanan BMD	12 keg	35.000.000,00	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000,00		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000,00	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000,00		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000,00	
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	12 keg	5.000.000,00	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	12 keg	5.000.000,00	

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				40.000.000,00		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				40.000.000,00	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				5.000.000,00		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				5.000.000,00	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000,00		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000,00	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5.000.000,00		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5.000.000,00	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah kegiatan monitoring pegawai	12 keg	5.000.000,00		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah kegiatan monitoring pegawai	12 keg	5.000.000,00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan	1 kegiatan	10.000.000,00		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan	1 kegiatan	10.000.000,00	
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	91%	10.000.000,00	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	91%	10.000.000,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi yang diadakan	1 paket	498.000.000,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi yang diadakan	1 paket	498.000.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan kantor yang diadakan	1 paket	5.000.000,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan kantor yang diadakan	1 paket	5.000.000,00	

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000,00		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.000.000,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat yg diadakan	1 paket		40.000.000,00		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat yg diadakan	1 paket	40.000.000,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang diadakan	1 paket		54.000.000,00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang diadakan	1 paket	54.000.000,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan buku perundang-undangan yang diadakan	1 paket		38.000.000,00		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan buku perundang-undangan yang diadakan	1 paket	38.000.000,00	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang diadakan	1 paket		3.000.000,00		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang diadakan	1 paket	3.000.000,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang diadakan	1 paket		66.000.000,00		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang diadakan	1 paket	66.000.000,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi	1 paket		7.000.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi	1 paket	7.000.000,00	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah keg penatausahaan arsip yang dilaksanakan	1 paket		140.000.000,00		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah keg penatausahaan arsip yang dilaksanakan	1 paket	140.000.000,00	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				80.000.000,00		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			80.000.000,00	
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dg mobil operasional			40.000.000,00	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dg mobil operasional		40.000.000,00	

		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			110.000.000,00		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			110.000.000,00	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional fogging yang diadakan		35.000.000,00		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional fogging yang diadakan		35.000.000,00	
		Pengadaan Mebel			0,00		Pengadaan Mebel			0,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000,00	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya			10.000.000,00		Pengadaan Aset Tetap Lainnya			10.000.000,00	
		Pengadaan Aset Tak Berwujud			10.000.000,00		Pengadaan Aset Tak Berwujud			10.000.000,00	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000,00		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000,00		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000,00		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000,00	

	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	91%	10.000.000,00	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	91%	10.000.000,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				165.000.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				165.000.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	2.000.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	2.000.000,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	140.000.000,00		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	140.000.000,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				21.000.000,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				21.000.000,00
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Konsisi Baik	91%	2.000.000,00	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Konsisi Baik	91%	2.000.000,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300.000.000,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300.000.000,00

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 unit	50.000.000,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 unit	50.000.000,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang direhab	2 gedung	10.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang direhab	2 gedung	10.000.000,00	
	9	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terserap > 90%		140.000.000,00	9	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terserap > 90%		140.000.000,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Persentase realisasi anggaran blud	92%	55.578.000.000,00		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Persentase realisasi anggaran blud	92%	55.578.000.000,00	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		AKI	111/100.000 KH	55.578.000.000,00		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		AKI	111/100.000 KH	55.578.000.000,00	
				AKB	4,2/1.000 KH	124.537.211.889,00				AKB	4,2/1.000 KH	124.537.211.889,00	
				Persentase Stunting	17%					Persentase Stunting	17%		
				Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna	75% (20 Pusk, 2 RD)					Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna	75% (20 Pusk, 2 RD)		
				Persentase KLB yang ditangani	39% (119 desa)					Persentase KLB yang ditangani	39% (119 desa)		
				Persentase ODF	100%					Persentase ODF	100%		

				Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)	swastisaba wiwerda					Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)	swastisaba wiwerda		
				Persentase kunjungan masyarakat ke faslitas kesehatan : R Jalan dan R Inap	64,5% dan 6,5%					Persentase kunjungan masyarakat ke faslitas kesehatan : R Jalan dan R Inap	64,5% dan 6,5%		
				Persentase Indikator SPM yang mencapai target	91% (11 Indikator)					Persentase Indikator SPM yang mencapai target	91% (11 Indikator)		
				Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	92%					Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	92%		
				Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar	92%					Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar	92%		
	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
				Jumlah gedung puskesmas yang direhab	6 puskesmas	51.281.362.306,00				Jumlah gedung puskesmas yang direhab	6 puskesmas	51.281.362.306,00	
				Jumlah gedung pustu yang terpelihara dengan baik	10 gedung pustu					Jumlah gedung pustu yang terpelihara dengan baik	10 gedung pustu		
				Jumlah sarana prasarana fasilitas kesehatan yang terpelihara dengan baik (dinkes)	26 sarana					Jumlah sarana prasarana fasilitas kesehatan yang terpelihara dengan baik (dinkes)	26 sarana		

				Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
				Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 paket				Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 paket		
				Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	11 paket				Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	11 paket		
				Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	7 paket				Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	7 paket		
				Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 paket				Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 paket		
	2	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dibangun		15.388.343.806,00	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun		15.388.343.806,00	
		Pengembangan Puskesmas				300.000.000,00		Pengembangan Puskesmas			300.000.000,00	
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				300.000.000,00		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			300.000.000,00	
	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dipelihara	6 pusk	12.655.500.000,00	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dipelihara	6 pusk	12.655.500.000,00	

	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Pustu yang dipelihara	10 pustu	6.500.000.000,00	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Pustu yang dipelihara	10 pustu	6.500.000.000,00
	6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alkes yang diadakan (Dinas)	1 paket	10.500.000.000,00	6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alkes yang diadakan (Dinas)	1 paket	10.500.000.000,00
	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah alkes di 27 puskesmas yang di kalibrasi	1 paket	180.000.000,00	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah alkes di 27 puskesmas yang di kalibrasi	1 paket	180.000.000,00
	8	Pengadaan Obat, Vaksin, bahan habis pakai dan Bahan Medis Habis Pakai				4.907.518.500,00	8	Pengadaan Obat, Vaksin, bahan habis pakai dan Bahan Medis Habis Pakai				4.907.518.500,00
				Jumlah obat yang diadakan	1 paket	2.000.000.000				Jumlah obat yang diadakan	1 paket	2.000.000.000
				Jumlah obat yang diadakan	1 paket	1.652.250.000				Jumlah obat yang diadakan	1 paket	1.652.250.000
				Distribusi e logistik	12 keg	55.268.500				Distribusi e logistik	12 keg	55.268.500
				Penunjang DAK	12 keg	120.000.000				Penunjang DAK	12 keg	120.000.000
	9			Jumlah paket Logistik dan Bahan Habis Pakai yang diadakan Dinkes	1 paket	1.080.000.000	9			Jumlah paket Logistik dan Bahan Habis Pakai yang diadakan Dinkes	1 paket	1.080.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				200.000.000,00		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				200.000.000,00

		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				50.000.000,00		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			50.000.000,00		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan kesehatan yang mencapai target	30 layanan	72.875.849.583,00		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan kesehatan yang mencapai target	30 layanan	72.875.849.583,00	
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan kesehatan, monitoring evaluasi program 6 kali, orientasi pemantapan program ke nakes dan masyarakat 3 kali, audit perinatal 4 kali, pelacakan kasus pusk dan RS 25 kali, supervisi fasilitatif 40 kali, sosialisasi KIA ke nakes 2 kali. Pembiayaan aplikasi P4K	18.650	403.293.000,00		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan kesehatan, monitoring evaluasi program 6 kali, orientasi pemantapan program ke nakes dan masyarakat 3 kali, audit perinatal 4 kali, pelacakan kasus pusk dan RS 25 kali, supervisi fasilitatif 40 kali, sosialisasi KIA ke nakes 2 kali. Pembiayaan aplikasi P4K	18.650	403.293.000,00	

	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah ibu hamil bersalin	17.758	5.324.000.000,00	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah ibu hamil bersalin	17.758	5.324.000.000,00
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (KN) Jumlah monitoring 6 kali, orotentasi bayi 4 kali, peningkatan SDM bidan terkait neonatal 2 kali, pelacakan bayi 25 kali, sosialisasi program 3 kali untuk kader dan nakes, superfisi fasilitatif 40 kali	17.102	266.200.000,00	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (KN) Jumlah monitoring 6 kali, orotentasi bayi 4 kali, peningkatan SDM bidan terkait neonatal 2 kali, pelacakan bayi 25 kali, sosialisasi program 3 kali untuk kader dan nakes, superfisi fasilitatif 40 kali	17.102	266.200.000,00
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah keg monitoring keg balita 30 kali, orientasi program kia 2 kali, peningkatan sumber daya bidan balita 2 kali, sosialisasi program balita ke nakes 3 kali	66.952	166.375.000,00	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah keg monitoring keg balita 30 kali, orientasi program kia 2 kali, peningkatan sumber daya bidan balita 2 kali, sosialisasi program balita ke nakes 3 kali	66.952	166.375.000,00

	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 (workshop remaja sehat 108 remaja), penyuluhan reproduksi	40.900	399.300.000,00	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 (workshop remaja sehat 108 remaja), penyuluhan reproduksi	40.900	399.300.000,00
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah usia produktif yang diberikan pelayanan kesehatan	107.600	66.550.000,00	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah usia produktif yang diberikan pelayanan kesehatan	107.600	66.550.000,00
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan. (Lomba posyandu lansia, pendampingan keluarga resiko tinggi pada lansia)	153.500	399.300.000,00	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan. (Lomba posyandu lansia, pendampingan keluarga resiko tinggi pada lansia)	153.500	399.300.000,00
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	83.776	199.650.000,00	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	83.776	199.650.000,00
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah penderita DM yg mendapatkan layanan kesehatan	50.700	199.650.000,00	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah penderita DM yg mendapatkan layanan kesehatan	50.700	199.650.000,00
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah penderita gangguan jiwa berat yg mendapat layanan kesehatan	2.711	199.650.000,00	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah penderita gangguan jiwa berat yg mendapat layanan kesehatan	2.711	199.650.000,00

	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah suspek TB yang diperiksa	3.113	399.300.000,00	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah suspek TB yang diperiksa	3.113	399.300.000,00
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah suspek/resiko HIV yang diperiksa	13.502	798.950.000,00	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah suspek/resiko HIV yang diperiksa	13.502	798.950.000,00
	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Penduduk yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan		1.500.000.000,00	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Penduduk yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan		1.500.000.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Penduduk yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan		1.500.000.000,00		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Penduduk yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan		1.500.000.000,00
	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah gizi buruk yang ditangani	85 balita	2.000.000.000,00	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah gizi buruk yang ditangani	85 balita	2.000.000.000,00
				Persentase bumil KEK						Persentase bumil KEK		
				Persentase cakupan ASI Eksklusif						Persentase cakupan ASI Eksklusif		
				Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi						Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi		

				Pengadaan Susu Tinggi Kalori untuk Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis)						Pengadaan Susu Tinggi Kalori untuk Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis)				
				Pengadaan Alat Ukur Panjang Badan						Pengadaan Alat Ukur Panjang Badan				
				Pengadaan Sarana Ruang Laktasi						Pengadaan Sarana Ruang Laktasi				
				Pengadaan Leaflet						Pengadaan Leaflet				
				Foto Copy						Foto Copy				
				Cetak Juknis Surveilans Gizi						Cetak Juknis Surveilans Gizi				
	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah UKK, Siswa kelas 4-6 SD, orang guru OR/UKS yang dibina	26 UKK, 100 orang siswa SD, 30 guru UKS	80.000.000,00	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah UKK, Siswa kelas 4-6 SD, orang guru OR/UKS yang dibina	26 UKK, 100 orang siswa SD, 30 guru UKS	80.000.000,00		
	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		DAM (Depot Air Minum) 90 yg dilatih, pemeriksaan air minum dan air bersih 70 sampel, rumah sehat 72%, pembentukan 1 UKK	90 Air minum, 70 sampel air bersih, rumah sehat 75%, pembentukan pos UKK 1	900.000.000,00	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		DAM (Depot Air Minum) 90 yg dilatih, pemeriksaan air minum dan air bersih 70 sampel, rumah sehat 72%, pembentukan 1 UKK	90 Air minum, 70 sampel air bersih, rumah sehat 75%, pembentukan pos UKK 1	900.000.000,00		
	19	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Siara Radio, Media cetak, poster, leaflet, cetak banner, media televisi dan kelompok tananan yg mendapatkan penyuluhan	36 kali siara radio, 12 kali media cetak, 5000 lembar poster, 5000 lembar leaflet, 2700 m persegi cetak baliho, TV 1 paket, 56 kelompok/tatanan	600.000.000,00	19	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Siara Radio, Media cetak, poster, leaflet, cetak banner, media televisi dan kelompok tananan yg mendapatkan penyuluhan	36 kali siara radio, 12 kali media cetak, 5000 lembar poster, 5000 lembar leaflet, 2700 m persegi cetak baliho, TV 1 paket, 56 kelompok/tatanan	600.000.000,00		

	20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah puskesmas yang dibina, jumlah sosialisasi STPT ke hattra, Pengiriman petugas pelatihan akupresure, Pembinaan kader asman toga 27orang,	27 puskesmas, 27 orang	75.000.000,00	20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah puskesmas yang dibina, jumlah sosialisasi STPT ke hattra, Pengiriman petugas pelatihan akupresure, Pembinaan kader asman toga 27orang,	27 puskesmas, 27 orang	75.000.000,00
	21	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah keg surveilans	240 kali	650.000.000,00	21	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah keg surveilans	240 kali	650.000.000,00
				Kegiatan pemeriksaan haji	1 kali					Kegiatan pemeriksaan haji	1 kali	
				Surveilans tata kelola rantai dingin	104 kali					Surveilans tata kelola rantai dingin	104 kali	
				Surveilans suhu vaksin	304 kali					Surveilans suhu vaksin	304 kali	
				Pemantauan rantai dingin	81 kali					Pemantauan rantai dingin	81 kali	
	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah pelayanan kesehatan dg mslh kesehatan jiwa	5200 orang	50.000.000,00	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah pelayanan kesehatan dg mslh kesehatan jiwa	5200 orang	50.000.000,00
	23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	54 sekolah,10 pondok	50.000.000,00	23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	54 sekolah,10 pondok	50.000.000,00
	25	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Pengelolaan penanganan krisis kesehatan		0,00	25	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Pengelolaan penanganan krisis kesehatan		0,00

	26	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Fogging Fokus DBD	250 fokus	400.000.000,00	26	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Fogging Fokus DBD	250 fokus	400.000.000,00
	27	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah PBID yang dibiayai, visum	43143, 103 pasien	24.000.000.000,00	27	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah PBID yang dibiayai, visum	43143, 103 pasien	24.000.000.000,00
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	54 sekolah,10 pondok	50.000.000,00		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	54 sekolah,10 pondok	50.000.000,00
	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Kegiatan pengiriman sampel	240 kali	120.000.000,00	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Kegiatan pengiriman sampel	240 kali	120.000.000,00
	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Mewujudkan 5 tatanan, 4 wajib 1 pilihan	swastisaba wiwerda	295.000.000,00	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Mewujudkan 5 tatanan, 4 wajib 1 pilihan	swastisaba wiwerda	295.000.000,00
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00
	30	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah pasien yang mendapat bantuan makmin pasien sebanyak 56.000	56.000 pasien	1.080.000.000	30	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah pasien yang mendapat bantuan makmin pasien sebanyak 56.000	56.000 pasien	1.080.000.000
				BOK Pusk	27 puskesmas	19.000.000.000				BOK Pusk	27 puskesmas	19.000.000.000
				BOK Dinkes	12 bulan	1.200.000.000				BOK Dinkes	12 bulan	1.200.000.000

	31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah alat di labkesda yang dipelihara, jumlah kesediaan anggaran untuk operasional labkesda	1 paket, 12 bulan	2.300.000.000,00	31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah alat di labkesda yang dipelihara, jumlah kesediaan anggaran untuk operasional labkesda	1 paket, 12 bulan	2.300.000.000,00
				Jumlah ketersediaan biaya operasional PMI, pembayaran utang reagen, pembelian reagen, operasional PMI	12 bulan					Jumlah ketersediaan biaya operasional PMI, pembayaran utang reagen, pembelian reagen, operasional PMI	12 bulan	
	32	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah penilaian Puskesmas (PKP), keg PAM Lebaran, jumlah puskesmas yg re akreditasi, pembinaan klinik	27 puskesmas PKP, 2 Pam lebaran, 6 re akred, 10 klinik	1.013.814.000,00	32	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah penilaian Puskesmas (PKP), keg PAM Lebaran, jumlah puskesmas yg re akreditasi, pembinaan klinik	27 puskesmas PKP, 2 Pam lebaran, 6 re akred, 10 klinik	1.013.814.000,00
	33	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah imunisasi dasar lengkap	18157	700.000.000,00	33	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah imunisasi dasar lengkap	18157	700.000.000,00
	34	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah keg kewaspadaan dini dan respon wabah	12 keg	500.000.000,00	34	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah keg kewaspadaan dini dan respon wabah	12 keg	500.000.000,00

	35	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Peningkatan Sarana dan Prasarana sistem penanganan Gawat darurat	1 paket	1.000.000.000,00	35	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Peningkatan Sarana dan Prasarana sistem penanganan Gawat darurat	1 paket	1.000.000.000,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				500.000.000,00		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				500.000.000,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				450.000.000,00		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				450.000.000,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				50.000.000,00		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				50.000.000,00
		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				1.200.000.000,00		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				1.200.000.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				700.000.000,00		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				700.000.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				289.817.583,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				289.817.583,00
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				600.000.000,00		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				600.000.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				50.000.000,00		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				50.000.000,00
		Pengelolaan Layanan Imunisasi				500.000.000,00		Pengelolaan Layanan Imunisasi				500.000.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				650.000.000,00		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				650.000.000,00

		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik	5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdomain, IKM)	180.000.000,00		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik	5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdomain, IKM)	180.000.000,00	
	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah portal sistem informasi yang harus dikelola	4 portal (epusk, web, komdat, siscobike) dan 5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil	180.000.000,00	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah portal sistem informasi yang harus dikelola	4 portal (epusk, web, komdat, siscobike) dan 5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil	180.000.000,00	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah RS yang difasilitasi perijinannya	1 RS (RS Sidowaras)	200.000.000,00		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah RS yang difasilitasi perijinannya	1 RS (RS Sidowaras)	200.000.000,00	
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Pengendalian Izin Operasional 11 Rumah Sakit	1 RS (RS Sidowaras)	50.000.000,00	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Pengendalian Izin Operasional 11 Rumah Sakit	1 RS (RS Sidowaras)	50.000.000,00	
	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tatakelola 11 pelayanan Rumah Sakit sesuai standar kemenkes	11 RS	50.000.000,00	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tatakelola 11 pelayanan Rumah Sakit sesuai standar kemenkes	11 RS	50.000.000,00	

	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Mutu pelayanan di 11 Rumah Sakit sesuai standar Kemenkes	11 RS	100.000.000,00	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Mutu pelayanan di 11 Rumah Sakit sesuai standar Kemenkes	11 RS	100.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	90%	3.050.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	90%	3.050.000.000,00
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah (Medis dan Paramedis)	1250	150.000.000,00		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah (Medis dan Paramedis)	1250	150.000.000,00
	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				0,00	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				0,00
	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah nakes yg dibina dan diterbitkan surat ijinnya	1250	150.000.000,00	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah nakes yg dibina dan diterbitkan surat ijinnya	1250	150.000.000,00
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan tenaga kesehatan sesuai standar yang ada	33,211,2	2.900.000.000,00		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan tenaga kesehatan sesuai standar yang ada	33,211,2	2.900.000.000,00

	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00
	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah nakes yg direkrut	33		900.000.000,00	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah nakes yg direkrut	33		900.000.000,00
			Jumlah perawat ponkesdes yang direkrut 211 dan jumlah dokter yg direkrut 2 orang	211,2		2.000.000.000,00			Jumlah perawat ponkesdes yang direkrut 211 dan jumlah dokter yg direkrut 2 orang	211,2		2.000.000.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan kompetensi SDM			0,00		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan kompetensi SDM			0,00
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0		0,00	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0		0,00

				Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan		550.000.000,00			Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan		550.000.000,00		
				Apotik (96 apotik)	0,75				Apotik (96 apotik)	0,75			
				Toko Obat (2 toko obat)	1				Toko Obat (2 toko obat)	1			
				Umot (1 umot)	100%	-			Umot (1 umot)	100%	-		
				PIRT (1900)	1780 (93%)				PIRT (1900)	1780 (93%)			
				Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan	20%				Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan	20%			
				jumlah pemberian ijinapotek, toko obat, toko alkes dan usaha mikro obat tradisional	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	130.000.000,00			jumlah pemberian ijinapotek, toko obat, toko alkes dan usaha mikro obat tradisional	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	130.000.000,00		
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				

	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah apotik, toko obat, toko alkes yg diawasi 20	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	130.000.000,00	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah apotik, toko obat, toko alkes yg diawasi 20	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	130.000.000,00
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Jumlah sertifikat produksiuatk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	3	55.000.000,00		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Jumlah sertifikat produksiuatk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	3	55.000.000,00
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				55.000.000,00	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				55.000.000,00

		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah sertifikat produksi pangan RT yang diterbitkan	120	175.000.000,00		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah sertifikat produksi pangan RT yang diterbitkan	120	175.000.000,00	
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah sertifikat yg dikeluarkan	120	175.000.000,00	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah sertifikat yg dikeluarkan	120	175.000.000,00	

		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan	70 sertifikat	60.000.000,00		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan	70 sertifikat	60.000.000,00	
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah jasa boga yang diawasi	70 jasa boga	60.000.000,00	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah jasa boga yang diawasi	70 jasa boga	60.000.000,00	
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	20 sekolah	50.000.000,00		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	20 sekolah	50.000.000,00	

	1	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				50.000.000,00	1	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			50.000.000,00	
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah yang diawasi 20 sekolah	20 sekolah	80.000.000,00		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah yang diawasi 20 sekolah	20 sekolah	80.000.000,00
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan	120 kali	80.000.000,00		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan	120 kali	80.000.000,00
	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah pemeriksaan post market 120	120 kali	50.000.000	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah pemeriksaan post market 120	120 kali	50.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Persentase Rumah Tangga BerPHBS	75	850.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Persentase Rumah Tangga BerPHBS	75	850.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	84,9		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	84,9	

		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan yang dilaksanakan	5 keg	250.000.000,00		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan yang dilaksanakan	5 keg	250.000.000,00	
	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah kegiatan kampanye, gebyar peringatan Hari Kesehatan Nasional	1 keg	250.000.000,00	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah kegiatan kampanye, gebyar peringatan Hari Kesehatan Nasional	1 keg	250.000.000,00	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader SBH yang dilakukan pembinaan		200.000.000,00		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader SBH yang dilakukan pembinaan		200.000.000,00	
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah sekolah, pondok pesantren, SBH, posyandu, dan desa siaga	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000,00	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah sekolah, pondok pesantren, SBH, posyandu, dan desa siaga	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000,00	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Posyandu yang dibina dan naik stratanya	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	400.000.000,00		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Posyandu yang dibina dan naik stratanya	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	400.000.000,00	

				Jumlah Desa Siaga yang dibina	6 posyandu					Jumlah Desa Siaga yang dibina	6 posyandu		
	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	6 desa siaga	400.000.000	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	6 desa siaga	400.000.000	
				Jumlah Desa Siaga yang dibina	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas					Jumlah Desa Siaga yang dibina	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas		
TOTAL						301.772.067.889,00	TOTAL						301.772.067.889,00

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat atau biasa disebut melalui *bottom up* dilakukan bersamaan dengan jadwal musrenbang di Kecamatan, yang dimulai dari tingkat Desa dan Kecamatan. Selain usulan dari Musrenbangcam, juga dilakukan telaah usulan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Sesuai dengan tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 (TC.32)
KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DAFTAR USULAN LANGSUNG					
		NIHIL			
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD					
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, strategi RPJMN 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi
2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5. Penguatan Sistem Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan.

Kebijakan Nasional diatas sudah diakomodir pada rancangan awal Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut : Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan yang mudah dan murah serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan

sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu	AHH	72,73	72,83	72,93	73,03	73,13
			IKM	79,46	80,46	81,46	82,46	83,46
			AKI	114	113	112	111	110
			AKB	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1
			Persentase Stunting	23%	21%	19%	17%	15%

			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	18% (5 Puskesmas)	37% (10 Puskesmas)	55% (15 Puskesmas)	74% (20 Puskesmas)	100% (27 Puskesmas)
			Persentase Desa KLB	64% (194 desa)	56% (169 desa)	47% (144 desa)	39% (119 desa)	31% (94 desa)
			Persentase ODF (desa ODF)	60,50%	70,50%	80,50%	90,50%	100%
			Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba wiwerda	swastisaba wiwerda	swastisaba wistara
			Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap	61,5% dan 6,3%	62,5% dan 6,4%	63,5% dan 6,4%	64,5% dan 6,5%	65,5% dan 6,6%
			Persentase Indikator SPM yang mencapai target	75% (9 indikator)	75% (9 indikator)	84% (10 indikator)	91% (11 Indikator)	100% (12 Indikator)
			Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	90	90	91	92	93
			Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar	90	90	91	92	93
			Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%	90%
			Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan					
			- Apotik (96 apotik)	30%	45%	60%	75%	100%
			- Toko Obat (2 toko obat)	100%	100%	100%	100%	100%
			- Umot (1 umot)	100%	100%	100%	100%	100%
			- PIRT (1900)	1420 (74%)	1540 (81%)	1660(87 %)	1780 (93%)	1900(100%)
			Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan	20%	20%	20%	20%	20%
			Persentase Rumah Tangga BerPHBS	72%	73%	74%	75%	76%

		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	81,90%	82,90%	83,90%	84,90%	85,90%
		Nilai RB	84,77	85,17	85,57	85,97	86,37
		Nilai Sakip	84,77	85,17	85,57	85,97	86,37

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah 5 program, yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 9) Peningkatan Pelayanan BLUD
- Sub Kegiatan :
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- Pembangunan Puskesmas
 - Pengembangan Puskesmas
 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Operasional Pelayanan Puskesmas
 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
 - Pengelolaan Layanan Imunisasi
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji

3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
- Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

- 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- 3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- Sub Kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- Sub Kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- 5) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- Sub Kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- 6) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- Sub Kegiatan :

- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

- 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Berikut gambaran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana sesuai dengan Tabel 3.2. :

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN MOJOKERTO (TC. 33)

DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
0 0 0 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Dinas Kesehatan	86,37 (A)	172.784.856.000,00			84,085 (A)	172.843.656.000,00
0 0 0 0	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik		86%	25.000.000,00			88%	25.000.000,00
1 0 0 0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.500.000,00	APBD			7.500.000,00
1 2 1 0		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Dinkes		1 dok (Renja)	7.500.000,00			2 dok	7.500.000,00
1 2 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun		2 dok	0			2 dok	0
1 2 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA Perubahan yang disusun		1 dok	0			1 dok	0

1	2	1	3		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA	4 kali	10.000.000	APBD		4 kali	10.000.000
1	2	1	4		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA	4 kali	0			4 kali	0
1	2	1	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan lap kinerja	6 kali	0			6 kali	
1	2	1	6		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok evaluasi yang disusun		7.500.000	APBD			7.500.000
1	2	1	7			Jumlah dok lap kinerja Dinas Kesehatan (lap Renja, LKJIP, SAKIP, PMPRB, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renstra)	7 dok	7.500.000			7 dok	7.500.000
1	2	2	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD	91%	116.033.856.000,00			92%	110.029.856.000,00
1	2	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan		100.664.046.000,00	APBD			94.660.046.000,00
						Dinkes	14 dok SPM	65.714.046.000			14 dok SPM	63.710.046.000
						Insentif	14 dok SPM	24.630.190.000			14 dok SPM	22.630.190.000
						BOP Dinkes dan Pusk	14 dok SPM	10.319.810.000			14 dok SPM	8.319.810.000

					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.319.810.000,00				15.319.810.000,00
				3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pengamanan BMD		12 keg	50.000.000,00			12 keg	50.000.000,00
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan BMD		12 keg	35.000.000,00			12 keg	40.000.000,00
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000,00				10.000.000,00
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00				5.000.000,00
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00				5.000.000,00
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00				5.000.000,00
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000,00				5.000.000,00
1	2	3	0	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		12 keg	5.000.000,00			12 keg	5.000.000,00

					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				40.000.000,00				40.000.000,00
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				5.000.000,00				5.000.000,00
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000,00				5.000.000,00
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5.000.000,00				5.000.000,00
1	2	3	2		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring pegawai		12 keg	5.000.000,00	APBD		12 keg	5.000.000,00
1	2	5	0		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan		1 kegiatan	10.000.000,00			1 kegiatan	10.000.000,00
1	2	5	5	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		91%	10.000.000,00	APBD		92%	10.000.000,00
1	2	5	9		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi yang diadakan		1 paket	498.000.000,00	APBD		1 paket	498.000.000,00

1	2	6	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	1 paket	5.000.000,00			1 paket	5.000.000,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.000.000,00				25.000.000,00
1	2	6	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat yg diadakan	1 paket	40.000.000,00	APBD		1 paket	40.000.000,00
1	2	6	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang diadakan	1 paket	54.000.000,00	APBD		1 paket	54.000.000,00
1	2	6	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan buku perundang-undangan yang diadakan	1 paket	38.000.000,00	APBD		1 paket	38.000.000,00
1	2	6	5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang diadakan	1 paket	3.000.000,00	APBD		1 paket	3.000.000,00
1	2	6	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang diadakan	1 paket	66.000.000,00	APBD		1 paket	66.000.000,00
1	2	6	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi	1 paket	7.000.000,00	APBD		1 paket	7.000.000,00
1	2	6	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah keg penatausahaan arsip yang dilaksanakan	1 paket	140.000.000,00	APBD		1 paket	140.000.000,00
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			80.000.000,00				80.000.000,00

1	2	6	9	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dg mobil operasional			40.000.000,00	APBD			40.000.000,00
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				110.000.000,00				110.000.000,00
1	2	6	10		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional fogging yang diadakan			35.000.000,00	APBD			35.000.000,00
					Pengadaan Mebel				0,00				0,00
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00				10.000.000,00
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000,00				10.000.000,00
					Pengadaan Aset Tak Berwujud				10.000.000,00				10.000.000,00
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00				5.000.000,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000,00				25.000.000,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00				5.000.000,00

				7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan		91%	10.000.000,00			92%	10.000.000,00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				165.000.000,00				165.000.000,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	2.000.000,00	APBD		12 bulan	2.000.000,00
1	2	8	0		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 paket	140.000.000,00			1 paket	140.000.000,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				21.000.000,00				21.000.000,00
1	2	8	2	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Konsisi Baik		91%	2.000.000,00	APBD		92%	2.000.000,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300.000.000,00				300.000.000,00

1	2	8	3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara		15 unit	50.000.000,00	APBD		15 unit	50.000.000,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00				100.000.000,00
1	2	9	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab		2 gedung	10.000.000,00			2 gedung	10.000.000,00
1	2	9	2	9	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terserap > 90%			140.000.000,00	APBD			140.000.000,00
1	2	9	9		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase realisasi anggaran blud		92%	55.578.000.000,00	APBD		93%	61.635.800.000,00
1	2	10	0		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AKI		111/100.000 KH	55.578.000.000,00			110/100.000 KH	61.635.800.000,00
1	2	10	1			AKB		4,2/1.000 KH	124.537.211.889,00	FKTP		4,1/1.000 KH	127.220.825.975,00
2	0	0	0			Persentase Stunting	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	17%				15%	
						Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna		75% (20 Pusk, 2 RD)				100% (27 Pusk, 2 RD)	
						Persentase KLB yang ditangani		39% (119 desa)				31% (94 desa)	

						Persentase ODF		100%				100%	
						Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)		swastisaba wiwerda				swastisaba wistara	
						Persentase kunjungan masyarakat ke faslitas kesehatan : R Jalan dan R Inap		64,5% dan 6,5%				65,5% dan 6,6%	
						Persentase Indikator SPM yang mencapai target		91% (11 Indikator)				100% (12 Indikator)	
						Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar		92%				93%	
						Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar		92%				93%	
				1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah gedung puskesmas yang direhab		6 puskesmas	51.281.362.306,00			7 puskesmas	53.913.972.175,00
2	2	1	0			Jumlah gedung pustu yang terpelihara dengan baik		10 gedung pustu				5 gedung pustu	

						Jumlah sarana prasarana fasilitas kesehatan yang terpelihara dengan baik (dinkes)		26 sarana				27 sarana		
						Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		8 paket				8 paket		
						Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin		11 paket				11 paket		
						Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai		7 paket				7 paket		
						Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		7 paket				7 paket		
				2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun			15.388.343.806,00					19.534.748.150,00
					Pengembangan Puskesmas				300.000.000,00					300.000.000,00

					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				300.000.000,00				300.000.000,00
				3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dipelihara	6 puskesmas		12.655.500.000,00			7 puskesmas	13.921.050.000,00
				4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu yang dipelihara	10 pustu		6.500.000.000,00	DID, DBHCHT		5 pustu	3.500.000.000,00
2	2	1	10	6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alkes yang diadakan (Dinas)	1 paket		10.500.000.000,00	DID, DBHCHT		1 paket	10.500.000.000,00
2	2	1	13	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alkes di 27 puskesmas yang dikalibrasi	1 paket		180.000.000,00	APBD		1 paket	180.000.000,00
2	2	1	14	8	Pengadaan Obat, Vaksin, bahan habis pakai dan Bahan Medis Habis Pakai				4.907.518.500,00	DAK FISIK			4.907.518.500,00
2	2	1	15			Jumlah obat yang diadakan	1 paket		2.000.000.000	APBD		1 paket	2.000.000.000
2	2	1	16			Jumlah obat yang diadakan	1 paket		1.652.250.000	APBD, DBHCHT, DAK		1 paket	1.652.250.000
						Distribusi e logistik	12 keg		55.268.500			12 keg	55.268.500
						Penunjang DAK	12 keg		120.000.000			12 keg	120.000.000
				9		Jumlah paket Logistik dan Bahan Habis Pakai yang diadakan Dinkes	1 paket		1.080.000.000			1 paket	1.080.000.000

					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				200.000.000,00				120.000.000,00
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				50.000.000,00				55.701.000,00
2	2	1	17		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan yang mencapai target		30 layanan	72.875.849.583,00	APBD, DBHCHT, DAK		30 layanan	72.926.853.800,00

2	2	1	19	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan kesehatan, monitoring evaluasi program 6 kali, orientasi pemantapan program ke nakes dan masyarakat 3 kali, audit parinatal 4 kali, pelacakan kasus pusk dan RS 25 kali, supervisi fasilitatif 40 kali, sosialisasi KIA ke nakes 2 kali. Pembiayaan aplikasi P4K	18.650	403.293.000,00	APBD	18.750	443.622.300,00
2	2	2	0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil bersalin	17.758	5.324.000.000,00		17.858	4.000.000.000,00

							17.102				17.202	
2	2	2	1	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (KN) Jumlah monitoring 6 kali, orotenti bayi 4 kali, peningkatan SDM bidan terkait neonatal 2 kali, pelacakan bayi 25 kali, sosialisasi program 3 kali untuk kader dan nakes, superfiisifasilitatif 40 kali		266.200.000,00	APBD			292.820.000,00
2	2	2	2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah keg monitoring keg balita 30 kali, orientasi program kia 2 kali, peningkatan sumber daya bidan balita 2 kali, sosialisasi program balita ke nakes 3 kali	66.952	166.375.000,00	APBD, DAK NON FISIK		67.052	183.012.500,00

2	2	2	3	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 (workshop remaja sehat 108 remaja), penyuluhan reproduksi	40.900	399.300.000,00	APBD	41.400	439.230.000,00
2	2	2	4	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang diberikan pelayanan kesehatan	107.600	66.550.000,00	APBD	108.100	73.205.000,00
2	2	2	5	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan. (Lomba posyandu lansia, pendampingan keluarga resiko tinggi pada lansia)	153.500	399.300.000,00	APBD	154.000	439.230.000,00
2	2	2	6	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	83.776	199.650.000,00	APBD	85.776	219.615.000,00
2	2	2	7	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yg mendapatkan layanan kesehatan	50.700	199.650.000,00	APBD	52.700	219.615.000,00
2	2	2	8	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita gangguan jiwa berat yg mendapat layanan kesehatan	2.711	199.650.000,00	APBD	2.911	219.615.000,00

2	2	2	9	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah suspek TB yang diperiksa	3.113	399.300.000,00	APBD	3.313	439.230.000,00
2	2	2	10	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah suspek/resiko HIV yang diperiksa	13.502	798.950.000,00	APBD	14.002	858.845.000,00
				14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penduduk yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan		1.500.000.000,00	APBD		1.500.000.000,00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Penduduk yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan		1.500.000.000,00			1.500.000.000,00
				16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah gizi buruk yang ditangani	85 balita	2.000.000.000,00	APBD	80 balita	2.000.000.000,00
						Persentase bumil KEK			APBD		
2	2	2	15			Persentase cakupan ASI Eksklusif			APBD		
						Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi					

2	2	2	16	19	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Siara Radio, Media cetak, poster, leaflet, cetak banner, media televisi dan kelompok tananan yg mendapatkan penyuluhan		36 kali siara radio, 12 kali media cetak, 5000 lembar poster, 5000 lembar leaflet, 2700 m persegi cetak baliho, TV 1 paket, 56 kelompok/tatanan	600.000.000,00	APBD		36 kali siara radio, 12 kali media cetak, 5000 lembar poster, 5000 lembar leaflet, 2700 m persegi cetak baliho, TV 1 paket, 56 kelompok/tatanan	600.000.000,00
2	2	2	17	20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang dibina, jumlah sosialisasi STPT ke hattra, Pengiriman petugas pelatihan akupresure, Pembinaan kader asman toga 27orang,		27 puskesmas, 27 orang	75.000.000,00	APBD, DAK NON FISIK		27 puskesmas, 27 orang	75.000.000,00
2	2	2	18	21	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah keg surveilans		240 kali	650.000.000,00	APBD, DAK NON FISIK		240 kali	600.000.000,00
2	2	2	19			Kegiatan pemeriksaan haji		1 kali		APBD		1 kali	
2	2	2	20			Surveilans tata kelola rantai dingin		104 kali		APBD, DAK NON FISIK		104 kali	
						Surveilans suhu vaksin		304 kali				304 kali	
						Pemantauan rantai dingin		81 kali				81 kali	
				22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah pelayanan kesehatan dg msih kesehatan jiwa		5200 orang	50.000.000,00			5200 orang	50.000.000,00

				23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza		54 sekolah,10 pondok	50.000.000,00			54 sekolah,10 pondok	50.000.000,00
2	2	2	22	25	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pengelolaan penanganan krisis kesehatan			0,00	APBD			0,00
				26	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fogging Fokus DBD		250 fokus	400.000.000,00			250 fokus	400.000.000,00
				27	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah PBID yang dibiayai, visum		43143, 103 pasien	24.000.000.000,00			43143, 103 pasien	25.000.000.000,00
2	2	2	25		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza		54 sekolah,10 pondok	50.000.000,00	APBD		54 sekolah,10 pondok	50.000.000,00
2	2	2	26	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Kegiatan pengiriman sampel		240 kali	120.000.000,00	PAJAK ROKOK		240 kali	120.000.000,00
				29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Mewujudkan 5 tatanan, 4 wajib 1 pilihan		swastisaba wiwerda	295.000.000,00	APBD		swastisaba wistara	295.000.000,00

2	2	2	28		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			0,00	APBD, DAK NON FISIK			0,00
				30	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah pasien yang mendapat bantuan makmin pasien sebanyak 56.000	56.000 pasien	1.080.000.000			56.000 pasien	21.280.000.000,00
						BOK Pusk	27 puskesmas	19.000.000.000			27 puskesmas	
2	2	2	33			BOK Dinkes	12 bulan	1.200.000.000	APBD, DAK NON FISIK		12 bulan	
				31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah alat di labkesda yang dipelihara, jumlah kesediaan anggaran untuk operasional labkesda	1 paket, 12 bulan	2.300.000.000,00			1 paket, 12 bulan	2.300.000.000,00
						Jumlah ketersediaan biaya operasional PMI, pembayaran utang reagen, pembelian reagen, operasional PMI	12 bulan				12 bulan	
2	2	2	34	32	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian Puskesmas (PKP), keg PAM Lebaran, jumlah puskesmas yg re akreditasi, pembinaan klinik	27 puskesmas PKP, 2 Pam Lebaran, 6 re akred, 10 klinik	1.013.814.000,00	APBD		27 puskesmas PKP, 2 Pam Lebaran, 10 klinik	1.013.814.000,00

										APBD				
2	2	2	35	33	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah imunisasi dasar lengkap	18157	700.000.000,00	APBD		18357	700.000.000,00		
				34	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah keg kewasoodaan dini dan respon wabah	12 keg	500.000.000,00	DAK NON FISIK		12 keg	500.000.000,00		
2	2	2	36	35	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Peningatan Sarana dan Prasaranan sistem penanganan Gawat darurat	1 paket	1.000.000.000,00	APBD, DAK NON FISIK		1 paket	1.000.000.000,00		
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			500.000.000,00				500.000.000,00		
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			450.000.000,00				450.000.000,00		
					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			50.000.000,00				40.000.000,00		
					Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			1.200.000.000,00				1.200.000.000,00		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			700.000.000,00				700.000.000,00		

						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				289.817.583,00				290.000.000,00
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				600.000.000,00				650.000.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				50.000.000,00				50.000.000,00
						Pengelolaan Layanan Imunisasi				500.000.000,00				500.000.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				650.000.000,00				650.000.000,00
2	2	2	37			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik		5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdomain, IKM)	180.000.000,00	APBD, DAK NON FISIK		5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdomain, IKM)	180.000.000,00
2	2	3	0	2		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah portal sistem informasi yang harus dikelola		4 portal (epusk, web, komdat, siscobike) dan 5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil	180.000.000,00			4 portal (epusk, web, komdat, siscobike)	180.000.000,00
2	2	3	2			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS yang difasilitasi perijinannya		1 RS (RS Sidowaras)	200.000.000,00	APBD		4 RS (RS Soekandar, RS Mutiara Hati, RS Kartini, RS Dian Husada)	200.000.000,00

2	2	3	3	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pengendalian Izin Operasional 11 Rumah Sakit		1 RS (RS Sidowaras)	50.000.000,00			4 RS (RS Soekandar, RS Mutiara Hati, RS Kartini, RS Dian Husada)	50.000.000,00
2	2	4	0	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tatakelola 11 pelayanan Rumah Sakit sesuai standar kemenkes		11 RS	50.000.000,00			11 RS	50.000.000,00
2	2	4	1	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Mutu pelayanan di 11 Rumah Sakit sesuai standar Kemenkes		11 RS	100.000.000,00	APBD		11 RS	100.000.000,00
2	2	4	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar		90%	3.050.000.000,00	APBD		90%	3.050.000.000,00
2	2	4	4		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah (Medis dan Paramedis)		1250	150.000.000,00	APBD		1275	150.000.000,00
3	0	0	0	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Dinas Kesehatan dan Puskesmas		0,00				0,00

3	2	1	0	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah nakes yg dibina dan diterbitkan surat ijinnya		1250	150.000.000,00			1275	150.000.000,00
3	2	1	1		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan tenaga kesehatan sesuai standar yang ada		33,211,2	2.900.000.000,00			33,211,2	2.900.000.000,00
3	2	1	2	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00	APBD			0,00
3	2	2	0	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah nakes yg direkrut		33	900.000.000,00			33	900.000.000,00
						Jumlah perawat ponkesdes yang direkrut 211 dan jumlah dokter yg direkrut 2 orang		211,2	2.000.000.000,00			211,2	2.000.000.000,00

3	2	2	2		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00	APBD			0,00
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan kompetensi SDM			0,00	DANA BK, APBD			0,00
				1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0		0,00			0	0,00
3	2	3	0		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan			550.000.000,00				580.000.000,00
3	2	3	1	Apotik (96 apotik)			0,75					1	
4	0	0	0	Toko Obat (2 toko obat)		Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1					1	
				Umot (1 umot)			100%		-			100%	-
				PIRT (1900)			1780 (93%)					1900(100%)	

						Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan		20%			0,2		
					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah pemberian ijinapotek, toko obat, toko alkes dan usaha mikro obat tradisional		15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	130.000.000,00			21 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	160.000.000,00
				1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alkes yg diawasi 20		15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	130.000.000,00			21Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	160.000.000,00

4	2	1	2		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sertifikat produksi utk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1		3	55.000.000,00	APBD		3	55.000.000,00
4	2	1	3	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				55.000.000,00	APBD			55.000.000,00
4	2	2	1		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat produksi pangan RT yang diterbitkan		120	175.000.000,00			120	175.000.000,00

4	2	2	2	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat yg dikeluarkan	120	175.000.000,00	APBD	120	175.000.000,00
4	2	3	0		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan	70 sertifikat	60.000.000,00		70 sertifikat	60.000.000,00

4	2	3	1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah jasa boga yang diawasi		70 jasa boga	60.000.000,00	APBD		70 jasa boga	60.000.000,00
4	2	4	0		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		20 sekolah	50.000.000,00			20 sekolah	50.000.000,00
4	2	4	1	1	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			50.000.000,00	APBD				50.000.000,00
4	2	5	0		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah yang diawasi 20 sekolah		20 sekolah	80.000.000,00			20 sekolah	80.000.000,00

4	2	5	1		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan		120 kali	80.000.000,00			120 kali	80.000.000,00
				1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah pemeriksaan post market 120		120 kali	50.000.000	APBD		120 kali	50.000.000
4	2	6	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS		75	850.000.000,00	APBD		76	850.000.000,00	
4	2	6	2		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif		84,9		APBD		85,9		
5	0	0	0		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan yang dilaksanakan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	5 keg	250.000.000,00			5 keg	250.000.000,00
				1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan kampanye, gebyar peringatan Hari Kesehatan Nasional Masyarakat		1 keg	250.000.000,00			1 keg	250.000.000,00

5	2	1	0		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader SBH yang dilakukan pembinaan			200.000.000,00				200.000.000,00
5	2	1	1	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah sekolah, pondok pesantren, SBH, posyandu, dan desa siaga		5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000,00	APBD		5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000,00
5	2	2	0		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu yang dibina dan naik stratanya		5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	400.000.000,00			5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	400.000.000,00
5	2	2	1			Jumlah Desa Siaga yang dibina		6 posyandu		APBD		6 posyandu	
5	2	3	0	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas		6 desa siaga	400.000.000	APBD, DAK NON FISIK		6 desa siaga	400.000.000
						Jumlah Desa Siaga yang dibina		6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas				6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	
									301.772.067.889,00				304.544.481.975,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan usulan Program Kegiatan Tahun 2023 disajikan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS
KESEHATAN

No	Kode	Program/Kegiatan	UP	B/L	Indikator Kinerja			Lokasi	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		KL	USULAN APBN	
					Output	Outcome	Target			SKPD Terkait	Pagu (Rp)		Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					86,37 (A)	Dinas Kesehatan	172.784.856.000,00					
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik		86%		25.000.000,00					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							7.500.000,00					
					Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Dinkes		1 dok (Renja)		7.500.000,00					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun		2 dok		0					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dok RKA Perubahan yang disusun		1 dok		0					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan DPA		4 kali		10.000.000					

BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Ranwal Renja PD ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Mojokerto.

Proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan menerapkan mekanisme perencanaan **bottom up planning** dan **top down policy**. Oleh karena itu kegiatan yang terdapat di dalam Ranwal Renja PD Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan hasil dari usulan-usulan kegiatan dari tiap-tiap Bidang yang disinkronkan dan diselaraskan dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur maupun dari Pemerintah Pusat dalam hal ini kebijakan Kementerian Kesehatan. Untuk itu perlu dukungan dana dari semua pihak baik dari pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto di tahun-tahun mendatang akan diusahakan dengan menempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kesehatan. Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang Kesehatan secara luas.

Mojokerto, Januari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO



dr. ULUM ROKHMAT R, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197411132006041008

